



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024	1
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan/Tantangan	13
BAB II VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	20
A. Visi Kementerian Sekretariat Negara	20
B. Misi Kementerian Sekretariat Negara	20
C. Tata Nilai Kementerian Sekretariat Negara	21
D. Tujuan	21
E. Sasaran Strategis	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	26
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	26
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara	28
C. Kerangka Regulasi	30
D. Kerangka Kelembagaan	50
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	59
A. Target Kinerja	59
B. Kerangka Pendanaan	64
BAB V PENUTUP	320



SALINAN

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun dan dilaksanakan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, rencana strategis kementerian/lembaga ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

9. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 merupakan rencana strategis Kementerian Sekretariat Negara untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berisi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan, dan Sasaran Strategis;
 - c. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
 - e. Penutup.
- (2) Target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d juga memuat target kinerja dan kerangka pendanaan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 3 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:

- a. penyusunan Peta Strategi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- b. penyusunan Rencana Kerja Kementerian Sekretariat Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- c. penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 5

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat dilakukan perubahan, dalam hal terdapat:

- a. kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan;
- b. perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sepanjang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan; dan/atau

c. kebijakan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan perencanaan dan/atau penganggaran, sepanjang perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.

Pasal 6

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran - Rencana Strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

Pasal 7 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1743

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Plt. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
Hukum, dan Reformasi Birokrasi,



Agussalim



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Kondisi Eksternal

Dunia kini tunggang langgang. Maksudnya yaitu dunia berubah demikian cepat dan radikal. Sejumlah pangkaji menyebut situasi ini dengan akronim Bahasa Inggris, VUCA: bergejolak (*Volatile*), tidak pasti (*Uncertain*), kompleks (*Complex*), dan tidak jelas (*Ambiguous*). Berikut adalah empat faktor yang menyebabkannya.

a. Disrupsi dan Tuntutan Adaptasi

Disrupsi yang melanda segala bidang menyebabkan dunia semakin sukar diprediksi (*unpredictable*). Disrupsi terjadi karena perpaduan revolusi teknologi, revolusi industri, dan revolusi model bisnis. Revolusi teknologi hadir dengan dua sisi. Di satu sisi, revolusi teknologi memudahkan pekerjaan manusia. Di sisi lain revolusi teknologi juga berpotensi menyaingi dan mengambil alih peran yang dimainkan manusia. Revolusi teknologi dan revolusi industri tidak bisa dipisahkan. Revolusi industri 1.0 (mulai tahun 1784) terjadi karena dipicu penemuan dan penggunaan mesin uap dalam industri. Revolusi industri 2.0 (mulai tahun 1870) dipicu oleh penemuan dan penggunaan mesin produksi masal bertenaga listrik/minyak. Selanjutnya, revolusi industri 3.0 (mulai tahun 1969) terjadi karena penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Sedangkan revolusi industri 4.0 yang kini masih berkembang dipicu oleh *digitization*, *computing power*, dan *data*

analytics . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

analytics melalui *cyber-physical*, *artificial intelligence*, *internet of things (IoT)*, *big data*, dan *cloud computing*. Revolusi industri 4.0 yang dibarengi dengan revolusi model bisnis akhirnya memicu disrupsi yang melanda segala bidang.

Dampaknya kemudian banyak hal yang kuat, mapan, menang, dan bertahan sekian lama, tiba-tiba menjadi usang (*obsolete*), tidak relevan, jatuh, bahkan mati digantikan model baru, misalnya organisasi (*the emerging organizations and managements*), pekerjaan dan profesi (*the emerging jobs and professions*), ilmu (*the emerging sciences*), maupun keterampilan (*the emerging skills*). Dengan demikian disrupsi hadir membawa ragam tantangan sekaligus peluang baru.

Kementerian Sekretariat Negara harus mampu memahami situasi ini sekaligus memanfaatkan peluang dan memitigasi risiko yang mengiringinya. Kementerian Sekretariat Negara harus memiliki karakter yang adaptif, responsif, lincah (*agile*), dinamis, dan fleksibel. Untuk mewujudkan karakter tersebut Kementerian Sekretariat Negara menerapkan strategi deregulasi dan debirokratisasi. Kementerian Sekretariat Negara tidak boleh terjebak pada gaya lama yang kaku, rigid, monoton, dan konservatif. Oleh karena itulah regulasi dan birokrasi dibuat lebih sederhana, lebih longgar, lebih efisien, efektif, dan utamanya produktif. Di samping itu Kementerian Sekretariat Negara juga harus mengembangkan talenta agar memiliki karakter sebagai seorang pembelajar yang lincah dan kuat (*powerful agile learner*).

b. Kemajuan Teknologi Informasi dan Tuntutan Digitalisasi

Pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menyebabkan dunia menjadi semakin digital. Komunikasi dan akses informasi menjadi cepat, mudah, dan murah karena sifatnya yang digital. Arus lalu lintas orang, barang, modal, informasi, dan ilmu pengetahuan juga menjadi semakin cepat, mudah, dan murah karena terjadi tak hanya secara fisik tetapi juga secara digital.

Pemahaman digital (*digital knowledge*) mutlak diperlukan untuk bisa secara produktif mengambil keuntungan dari berbagai peluang baru yang tercipta di era digital ini. Berbagai peluang baru tersebut sebagian besar terkait dengan pertumbuhan data yang begitu pesat. Sumber daya paling mahal di dunia saat ini

adalah . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

adalah data. Mereka yang menguasai data akan menguasai dunia. Olah kerenanya tak heran jika era ini kerap disebut pula sebagai era big data.

Berangkat dari latar belakang itu kemudian Kementerian Sekretariat Negara serius melakukan transformasi digital. Kementerian Sekretariat Negara harus mengubah cara berpikir dan cara kerjanya yang analog menjadi digital. Persoalan digital ini harus dipahami secara utuh dan menyeluruh (*comprehensive*). Transformasi digital mencakup empat komponen utama, yakni: 1) infrastruktur, meliputi *digital equipment*, *digital connectivity*, dan *digital platform*; 2) kelembagaan, melingkupi persoalan struktur organisasi, birokrasi, regulasi, maupun *business process*; 3) SDM, mencakup *mindset/logic*, *knowledge*, dan *skill* baik sebagai *digital specialist*, *smart digital user*, maupun *digital leader*; dan 4) ekosistem yang melingkupi seluruhnya termasuk kultur. Di samping itu, kantor Kementerian Sekretariat Negara juga harus berbasis teknologi terkini (*high tech-based office*) dan segala pengambilan kebijakan juga harus didasarkan pada data (*data driven policy making*). Hal-hal yang bisa dikerjakan mesin-diotomasi, tidak perlu lagi dikerjakan oleh manusia. Dengan begitu proses kerja menjadi lebih efisien, efektif, produktif, cepat, akurat, dan berkualitas.

c. Globalisasi, Hiperkompetisi, dan Tuntutan Akselerasi Inovasi

Pendalaman globalisasi menyebabkan persaingan atau kompetisi di segala bidang menjadi semakin ketat, bebas, dan liar (*hipercompetition*). Hiper-kompetisi sendiri merupakan dampak dari dunia yang semakin terkoneksi (*interconnected world*) dan semakin minim sekat (*borderless*). Arus lalu lintas orang, barang, modal, informasi, dan ilmu pengetahuan bergerak sangat mudah, murah, dan cepat. Antar organisasi di berbagai sektor saling berebut investasi, teknologi, pasar, dan SDM bertalenta demi keunggulan dan kemajuan masing-masing. Di era hiper-kompetisi ini, kondisi lebih baik dari masa lalu tidaklah cukup. Untuk memenangkan kompetisi kita harus berdaya saing agar bisa lebih baik dari yang lain. Organisasi dengan daya saing kuat akan menang dan bertahan, sedangkan organisasi dengan daya saing lemah akan kalah dan terpuruk. Daya saing ini sangat terkait dengan keunggulan komparatif yang diupayakan melalui inovasi. Orientasinya tidak selalu keluar demi persaingan dan relevansi

organisasi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

organisasi (*outward looking*) namun juga ke dalam demi kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan orang-orang di dalamnya (*inward looking*).

Itulah mengapa Kementerian Sekretariat Negara dituntut melakukan pengembangan inovasi. Setidaknya ada tiga tujuan utama pengembangan inovasi di Kementerian Sekretariat Negara: 1) mengoptimalkan peluang dan meminimalkan risiko; 2) membuat kerja lebih efisien, efektif, dan produktif; serta 3) mencapai visi, dan utamanya melakukan lompatan kemajuan. Hal itu diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur, kelembagaan, SDM, dan ekosistem inovasi.

d. *Sharing Economy* dan Tuntutan Kolaborasi

Di era ekonomi baru ini paradigma yang berkembang adalah *sharing*. Paradigma tersebut diterapkan di semua sektor. Asumsi dasarnya adalah sumber daya yang dimiliki organisasi terbatas sedangkan kebutuhan dan tujuannya tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang tak terbatas itu maka diperlukan *sharing* satu sama lain. Selain untuk memenuhi kekurangan sumber daya, *sharing* juga bermanfaat untuk memperluas dan memperkaya perspektif. Intinya saling melengkapi.

Kementerian Sekretariat Negara dituntut untuk menerapkan paradigma *sharing* dengan skema kolaborasi baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Kolaborasi yang dilakukan, khususnya dengan pihak eksternal, harus secara serius memperhatikan isu keamanan, persaingan usaha, persepsi publik, dan akuntabilitas.

Dalam rangka menyusun langkah antisipatif terhadap dinamika pengelolaan pemerintahan, tiap organisasi pemerintah menetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dalam kurun waktu lima tahunan. Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Renstra Kementerian Sekretariat Negara disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Proses penyusunan Renstra Kementerian Sekretariat Negara melibatkan seluruh unsur organisasi dengan dipimpin oleh para pejabat tinggi selaku penanggungjawab pengambilan keputusan.

Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi pencapaian, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024.

Substansi Renstra disusun secara sistematis berdasarkan proyeksi kebijakan masa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya organisasi dan memperhatikan strategi pengarusutamaan pada RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif yang akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Empat pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gender, Modal Sosial dan Budaya, dan Transformasi Digital.

2. Kondisi Internal

Dalam kurun waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 dari RPJPN 2005-2025, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan pedoman strategis organisasi melalui Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015.

Seiring dengan dinamika yang berkembang di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, telah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Kementerian Sekretariat Negara tersebut, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Penyesuaian tersebut dilakukan terkait adanya hal-hal sebagai berikut:

1. perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Sekretaris . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;
2. penetapan Indikator Kinerja Utama di tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
 3. perlunya penyederhanaan program dalam rangka efektivitas penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun capaian dari sisi realisasi kinerja, reformasi birokrasi, kinerja anggaran dan keuangan, serta pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

1. Realisasi Kinerja Kementerian Sekretariat Negara

Dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa sebagai upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Sekretariat Negara, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan penyempurnaan IKU menjadi 11 (sebelas) indikator sejak tahun 2016-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017.

Berdasarkan evaluasi terhadap Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan program dalam upaya mencapai sasaran strategis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara secara umum telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi dari masing-masing sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tabel 1.1
Realisasi Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target 2019		Notifikasi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	2. Persentase hasil analisis gugatan dan prerogatif, serta kewarganegaraan yang disetujui oleh Presiden*)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan kewarganegaraan yang disetujui oleh Presiden*)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti*)	100%	100%	35%	42,6%	40%	40,16%	45%	47,31%	45%	46,6%		
	8. Persentase efektivitas koordinasi kerjasama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan Kementerian Sekretariat Negara*)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara*)	-	-	2,75 dalam skala 4	2,81 dalam skala 4	3,00 dalam skala 4	3,09 dalam skala 4	3,00 dalam skala 4	3,23 dalam skala 4	3,00 dalam skala 4	3,43 dalam skala 4			

2. Terjaminnya . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target 2019		Notifikasi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtangaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtangaan kepada Presiden dan Wakil Presiden*)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangaan kepada Presiden dan Wakil Presiden*)	-	-	4,44 dalam skala 6	4,93 dalam skala 6	4,44 dalam skala 6	5,02 dalam skala 6	4,44 dalam skala 6	5,10 dalam skala 6	4,69 dalam skala 6	5,13 dalam skala 6	
	2. Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden*)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden*)	-	-	4,44 dalam skala 6	4,97 dalam skala 6	4,44 dalam skala 6	5,03 dalam skala 6	4,44 dalam skala 6	5,12 dalam skala 6	4,69 dalam skala 6	5,16 dalam skala 6	
	3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman **)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015 s.d. 2019 Ket : *) Perubahan Indikator Kinerja Utama, formulasi perhitungan, dan/atau target capaian **) Penambahan Indikator Kinerja Utama												
Sudah tercapai/on track			Perlu kerja keras			Sangat sulit tercapai						



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. Reformasi Birokrasi

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Sekretariat Negara sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 telah melaksanakan reformasi birokrasi secara terencana, komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan pada bidang manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Sepanjang tahun 2015-2019 reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara telah terlaksana dengan baik. Hal itu tercermin dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Kementerian Sekretariat Negara tahun 2015 sampai dengan 2019 terus meningkat, sebagaimana dijelaskan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 1.2
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi
Tahun 2015-2019

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
A	Komponen Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,33	3,94	3,98	3,98	4,01
2	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	5,00	4,38	2,71	3,13	3,13	3,15
3	Penguatan Kelembagaan	6,00	4,50	3,84	4,34	4,34	4,39
4	Penguatan Tatalaksana	5,00	3,35	3,60	3,93	3,78	4,13
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	15,00	13,37	13,39	13,58	13,46	13,59
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6,00	3,61	3,95	4,15	4,35	4,44
7	Penguatan Sistem Pengawasan	12,00	6,19	8,37	8,84	8,50	8,63
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,66	4,23	4,43	4,56	4,61
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	36,38	44,02	46,38	46,10	46,95

B. Komponen . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
B	Komponen Hasil						
1	Nilai akuntabilitas kinerja	14,00	10,36	10,38	10,38	10,49	10,64
2	Survei internal integritas organisasi	6,00	5,31	5,41	4,83	5,42	5,88
3	Survei eksternal persepsi korupsi	7,00	5,29	6,13	6,37	6,28	6,53
4	Opini BPK	3,00	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Survei eksternal pelayanan publik	10,00	7,83	8,28	8,17	8,83	8,95
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	31,28	33,17	32,75	34,02	35,00
	Indeks Reformasi Birokrasi (A=B)	100,00	73,66	77,20	79,13	80,12	81,95
	Kategori		"BB"	"BB"	"BB"	"A"	"A"

Grafik 1.1
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi
Tahun 2015-2019



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Sekretariat Negara tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan adanya komitmen jajaran pimpinan Kementerian Sekretariat Negara yang tinggi, yang terlihat dari berbagai upaya penting yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- terbangunnya peta proses bisnis organisasi terkait pelaksanaan kegiatan prioritas;
- telah dilakukan reviu terhadap struktur organisasi untuk melihat ketepatan fungsi dan ukuran organisasi;

c. meningkatnya . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. meningkatnya pengembangan dan penerapan *e-government* dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- d. telah dikedepankan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif.

3. Kinerja Anggaran dan Opini Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan program yang terdapat di dalam Renstra Tahun 2015-2019, Kementerian Sekretariat Negara terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019

Tahun	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2015	2.446.302.966.000	1.989.282.791.798	81,32
2016	2.640.905.224.000	2.118.977.604.757	80,24
2017	2.088.445.493.000	1.875.901.283.791	89,82
2018	2.490.743.350.000	2.330.331.276.993	93,56
2019	2.611.083.649.000	2.445.322.464.821	93,65

Sumber:

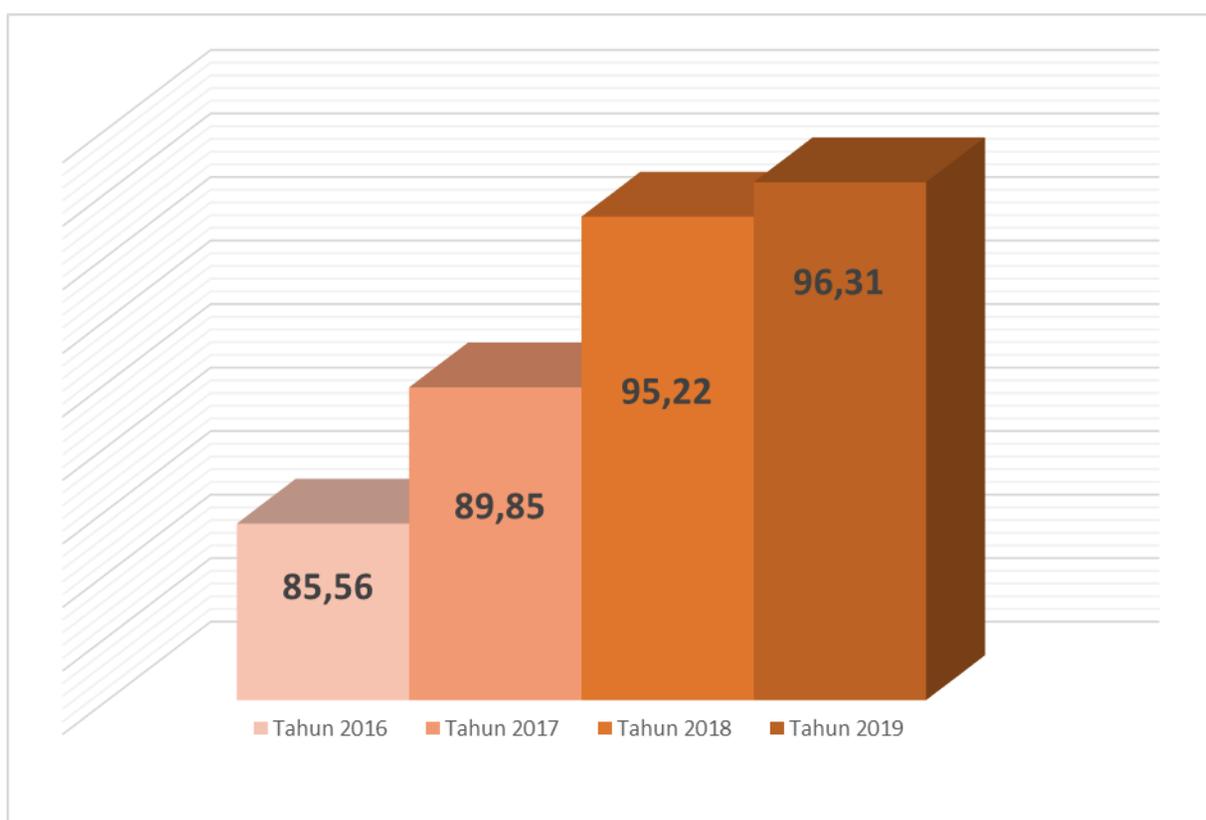
- Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan alokasi anggaran pada Kementerian Sekretariat Negara menunjukkan perkembangan yang relatif positif dengan realisasi anggaran tertinggi dicapai pada tahun 2019, yaitu sebesar 93,65%. Peningkatan signifikan ini salah satunya didukung adanya sinergi yang makin produktif antar Satuan Kerja dalam pengelolaan anggaran serta komitmen yang makin intensif di segenap aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, nilai kinerja anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2016-2019 juga terus meningkat.



Grafik 1.2
Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2016-2019



Evaluasi Kinerja Anggaran tersebut merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Dalam hal ini, Kementerian Sekretariat Negara mampu membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, Kementerian Sekretariat Negara terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya tersebut tercermin dalam capaian pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” (*Unqualified Opinion*) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara secara berturut-turut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

4. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal tersebut tercermin dalam capaian penilaian SAKIP pada tingkat akuntabilitas kinerja “BB” dengan nilai hasil evaluasi yang terkoreksi positif berkelanjutan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Penilaian SAKIP Tahun 2015-2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	22,03	21,08	22,36	22,57	22,57
2	Pengukuran Kinerja	25	18,61	18,93	19,00	19,48	19,48
3	Pelaporan Kinerja	15	12,42	11,83	11,86	11,97	11,97
4	Evaluasi Internal	10	7,25	6,81	7,08	7,09	7,18
5	Capaian Kinerja	20	13,71	15,50	14,61	14,88	15,04
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,02	74,15	74,91	75,99	76,24
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		“BB”	“BB”	“BB”	“BB”	“BB”

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selaku evaluator nasional akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan, memberikan predikat Sangat Baik bagi pencapaian akuntabilitas kinerja tahun 2019 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Poin penilaian dilihat dari tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

B. Potensi dan Permasalahan/Tantangan

Dalam upaya pencapaian visi melalui pelaksanaan misi sebagai instansi pemerintah yang secara langsung bertugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta melaksanakan penugasan yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kementerian Sekretariat Negara perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan/tantangan jangka pendek dan menengah yang akan dihadapi.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

1. Potensi

Secara umum, potensi Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut.

a. Posisi dan Peran Strategis Kementerian Sekretariat Negara dalam Memberikan Pelayanan Langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Kementerian Sekretariat Negara merupakan instansi yang secara langsung memberikan dukungan teknis kerumahtanggaan, keprotokolan, pengamanan, dan publikasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, peran yang tidak kalah penting adalah fungsi dukungan analisis kebijakan, analisis pendapat hukum dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan litigasi dan permasalahan hukum, pengelolaan hubungan kelembagaan, dukungan layanan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Secara ekonomi, berdasarkan studi di tahun 2019 oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu dari empat kekuatan ekonomi utama dunia pada tahun 2045, setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga didukung oleh bonus demografi berupa *booming* angkatan kerja produktif pada tahun 2025. Kedua hal tersebut menciptakan potensi sekaligus tantangan bagi Kementerian Sekretariat Negara dalam mengembangkan peran dukungan analisis kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Kedepannya, Presiden dan Wakil Presiden akan sangat membutuhkan partner diskusi yang dapat diandalkan dalam mempertajam pilihan strategi kebijakan yang akan diambil dalam memaksimalkan potensi tersebut.

Kegiatan strategis Kementerian Sekretariat Negara dalam menunjang isu prioritas nasional yang telah dilakukan antara lain pemberian dukungan analisis kebijakan isu prioritas Wakil Presiden dalam mendukung Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara, seperti proses perdamaian di Afghanistan, pelaksanaan program penanggulangan stunting, penanggulangan kemiskinan melalui TNP2K, dan penyelenggaraan Asian Games 2018.

Di sisi lain, kemampuan dan pengelolaan strategi komunikasi publik pemerintah harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Pernyataan kebijakan pemerintah oleh Presiden, Wakil Presiden, dan pembantu-pembantunya serta *sharing* informasi kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara menjadi sangat krusial pada masa ini, misalnya dalam penanganan isu kekinian

terkait . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

terkait pemindahan Ibu Kota Negara, *omnibus law*, dan peristiwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Prinsip kehati-hatian dalam transparansi informasi merupakan titik tekan yang dikedepankan dalam pengelolaan urusan kenegaraan.

b. Posisi dan Peran Strategis Kementerian Sekretariat Negara dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional.

Kementerian Sekretariat Negara, sebagai lembaga yang langsung melayani pucuk pimpinan nasional, berperan strategis dalam ikut menentukan kinerja di semua sektor pembangunan. Selain ikut berperan dalam mengoordinir pencapaian seluruh agenda yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kementerian Sekretariat Negara secara spesifik bertanggung jawab sebagai salah satu pemangku kepentingan yang menangani agenda pembangunan terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, khususnya terkait penguatan kerja sama pembangunan internasional.

Sebagai salah satu instansi pemerintah dari empat pilar utama pengelolaan hibah luar negeri secara nasional, bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara berperan mengelola anggaran hibah Pemerintah Indonesia kepada pihak asing dalam bentuk *capacity building program* dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Melalui program hibah tersebut diharapkan Pemerintah Indonesia dapat semakin meningkatkan peran aktif di dunia internasional melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian, sekaligus sebagai upaya memajukan perdagangan dan investasi.

Di sisi lain, Kementerian Sekretariat Negara juga memegang peranan signifikan dalam pengelolaan hibah asing bagi pemerintah Indonesia dalam kerangka kerja sama teknik luar negeri. Sebagai bagian dari empat pilar pengelola hibah nasional, Kementerian Sekretariat Negara berperan strategis dalam proses perencanaan, proses administrasi dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan hibah luar negeri.

c. Kualitas SDM Aparatur yang Terus Membaik

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Maret tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara diperkuat oleh 1.922 orang pegawai dengan dominasi sebesar 59,89% berada dalam rentang usia produktif, antara 20 sampai dengan 45 tahun. Selain itu, jumlah tersebut juga merepresentasikan komposisi sebesar 57,65% dari total pegawai yang memiliki jenjang pendidikan tinggi setara D4/S1 dan jenjang di atasnya.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Para pegawai didorong untuk terus mengembangkan kualifikasi dan kompetensi diri melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik secara klasikal maupun nonklasikal, di dalam dan di luar negeri. Program pengembangan kompetensi tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai *platform* pendanaan, baik berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara maupun mitra kerja sama lokal dan internasional.

Sebagai contoh hasil upaya pengembangan melalui program-program rintisan pendidikan gelar, terdapat peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai. Pada tahun 2015, pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sampai dengan S3 berjumlah 341 orang atau 16,66% dari total jumlah pegawai saat itu. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga per 31 Maret 2020 menjadi 420 orang atau 21,85% dari total pegawai.

Keunggulan demografi pegawai pada usia produktif serta pegawai yang mengenyam pendidikan tinggi tersebut juga ditunjang oleh upaya pemenuhan kesenjangan kompetensi yang dilaksanakan melalui program pengembangan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural.

Pengelolaan sumber daya manusia secara komprehensif salah satunya dilaksanakan melalui pengembangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia secara berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya identifikasi dan pemetaan dalam rangka proses pengambilan keputusan pengelolaan *human capital* secara strategis sesuai kebutuhan organisasi yang dinamis.

d. Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara yang Makin Baik dan Bersih

Menteri Sekretaris Negara, selaku pucuk pimpinan tertinggi, menunjukkan komitmen yang sangat luar biasa dalam upaya mewujudkan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi pendorong utama terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Hal itu terbukti dengan peningkatan capaian penilaian reformasi birokrasi serta tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara.

Selain itu, arahan Menteri Sekretaris Negara agar Kementerian Sekretariat Negara mengimplementasikan upaya debirokratisasi, deregulasi, serta digitalisasi tugas dan fungsi secara masif, menjadi *starting point* reformasi birokrasi guna mewujudkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai *smart government institution* yang menerapkan prinsip *good governance*. Berbagai terobosan telah dilakukan dalam upaya menumbuhkembangkan budaya



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

inovasi serta mewujudkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai *sustainable learning organization*.

Kementerian Sekretariat Negara memupuk semangat kompetitif para pegawai dalam berinovasi melalui berbagai upaya, termasuk dengan mengadakan lomba inovasi, lomba aksara cita inovasi, serta pemberian penghargaan khusus bagi para inovator. Upaya tersebut telah berhasil menumbuhkan budaya inovasi secara bertahap dan berkesinambungan. Para pegawai dengan dukungan penuh dari para pimpinan berhasil mengembangkan berbagai ide perubahan yang bertujuan mempercepat pelaksanaan tugas, termasuk melakukan pemangkasan rantai birokrasi dan digitalisasi proses layanan eksternal dan internal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pemanfaatan ide-ide *disruptive innovation* dalam era Revolusi Industri 4.0 juga menjadi titik tolak budaya perubahan yang *agile* dan kolaboratif. Kebaruan yang dibawa oleh *internet*, *big data*, *cloud computing* serta *machine learning* menjadi inspirasi dalam memberikan layanan berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kepemimpinan visioner yang dimotori langsung oleh Menteri Sekretaris Negara selaku pimpinan tertinggi Kementerian Sekretariat Negara merupakan potensi besar bagi terakomodasinya ide-ide inovatif dan kreatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang makin relevan dengan tuntutan pembangunan. Diperkuat oleh budaya organisasi yang semakin *agile* dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengedepankan proses automasi secara digital melalui pemanfaatan teknologi mutakhir antara lain berupa perluasan penerapan *internet*, *big data*, *cloud computing* serta *machine learning*, Kementerian Sekretariat Negara berkesempatan untuk menjadi yang terdepan dalam memberikan layanan berkualitas bagi para pemangku kepentingan.

2. Permasalahan/Tantangan

Adapun permasalahan/tantangan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

a. Interdependensi Penyelesaian Administrasi pada Kementerian/Lembaga

Penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara tidak terlepas dari peran serta instansi lainnya, salah satunya dalam proses harmonisasi dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang sangat tergantung pada inisiatif dari instansi pemrakarsa serta regulator, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ataupun Kementerian Dalam Negeri untuk peraturan menyangkut urusan kedaerahan.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Kebergantungan yang tinggi tersebut menjadi catatan tersendiri sebagai tantangan yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan. Sebagai contoh, dalam upaya penanganan proses administrasi pejabat pemerintahan, yang membutuhkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara sebelum diajukan sebagai rancangan Keputusan Presiden.

Isu interdependensi tersebut membutuhkan langkah tindak lanjut yang komprehensif. Kombinasi langkah penanganan serta langkah kolaboratif para pihak dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan secara mendasar. Diperlukan upaya penyelarasan proses bisnis secara koordinatif yang selanjutnya dapat diwujudkan dalam bentuk sinergitas sistem informasi antar pemangku kepentingan.

b. Tingginya Tingkat Harapan Publik untuk Penyelesaian Permasalahan oleh Presiden dan Wakil Presiden

Peran Presiden dan Wakil Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara Republik Indonesia telah menumbuhkan harapan besar bagi rakyat untuk dapat menyampaikan keluhan, aduan, dan kebutuhan secara langsung agar mendapatkan penyelesaian dengan segera.

Penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden tersebut menjadi tugas dan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu upaya implementasi Nawa Cita kedua yaitu memastikan pemerintah tidak absen dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Beragamnya pengaduan yang masuk serta kompleksitas para pihak yang terlibat menciptakan tantangan tersendiri dalam penyelesaian permasalahan. Di masa yang akan datang dibutuhkan evaluasi dan reformulasi langkah penyelesaian yang semakin efektif, efisien, komprehensif, dan integratif.

c. Tuntutan Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang Bebas Kesalahan atau *Zero Mistake*

Sebagai instansi pemerintah yang secara langsung memberikan dukungan administratif, teknis, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang bebas dari kesalahan. Konsep *zero mistake* menuntut kehati-hatian dan ketelitian para pihak yang terlibat dalam melaksanakan proses pekerjaan, khususnya terkait rekomendasi kebijakan dan *final gate* peraturan perundang-undangan, serta dukungan fisik dan non fisik terhadap pelaksanaan kegiatan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut merupakan langkah mitigasi resiko kesalahan dalam pengelolaan

pemerintahan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

pemerintahan yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap persepsi publik.

d. Tuntutan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara yang Baik dan Bersih secara Berkelanjutan

Komitmen kuat dari Menteri Sekretaris Negara dalam memimpin perubahan tata kelola pemerintahan membutuhkan dukungan yang kuat pula dari segenap pemangku kepentingan. Dibutuhkan *bridging* kebijakan yang detail dan komprehensif atas ide-ide perubahan yang dikemukakan oleh pucuk pimpinan tertinggi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara tersebut. Dibalik segala upaya inovatif yang telah dilakukan, Kementerian Sekretariat Negara masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang substantif, khususnya dalam mempertajam identitas dan peran organisasi Kementerian Sekretariat Negara di masa yang akan datang.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan menyederhanakan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja organisasi, selayaknya dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan ketersediaan dan alokasi sumber daya, serta kesesuaian dengan peta proses bisnis Kementerian Sekretariat Negara. Langkah re-identifikasi dan *re-mapping* unsur terkait merupakan hal krusial yang dibutuhkan dalam rangka memperkuat implementasi SPBE secara strategis dan berkesinambungan.

Catatan lain yang harus menjadi perhatian bagi Kementerian Sekretariat Negara adalah perlunya memperkaya upaya internalisasi nilai-nilai organisasi dan budaya kerja. Hal ini penting untuk dilakukan guna menciptakan kesamaan persepsi dan menumbuhkan semangat kolaboratif dalam pencapaian kinerja organisasi Kementerian Sekretariat Negara.

Selain itu, keberadaan beberapa lembaga yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, yaitu Pasukan Pengamanan Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kantor Staf Presiden, juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara yang baik dan bersih



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB II VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam mewujudkan visi Presiden 2020-2024 sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dan mempedomani potensi yang dimiliki serta sejumlah permasalahan dan tantangan di kurun waktu 2020-2024 sebagaimana diuraikan di bab sebelumnya, maka Kementerian Sekretariat Negara menetapkan penyesuaian visi kelembagaan dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.

Dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kesuksesan pemerintahan yang sedang berjalan, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut:

“Kementerian Sekretariat Negara yang berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Dengan visi tersebut, Kementerian Sekretariat Negara secara strategis akan melakukan berbagai upaya perubahan berkelanjutan guna menciptakan organisasi yang berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif dalam mendukung terwujudnya visi Presiden untuk menciptakan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasiskan pemanfaatan SDM unggul.

B. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

1. **Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, responsif, dan inovatif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;**
2. **Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media serta koordinasi pengamanan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan**
3. **Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara**

C. **Tata Nilai Kementerian Sekretariat Negara**

Sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi melalui pelaksanaan tugas fungsi jabatan, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan nilai-nilai organisasi yang kemudian akan diinternalisasikan menjadi budaya kerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Tata nilai Kementerian Sekretariat Negara adalah **Teladan-Baik**, yang berarti bahwa segenap aparatur di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara harus:

Teladan, mengandung arti patut ditiru atau dicontoh;

Berintegritas mengandung arti amanah, bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan;

Andal mengandung arti responsif, tangkas, cerdas, profesional, dan sepenuh hati;

Inovatif mengandung arti adaptif, kreatif, solutif, dan berorientasi hasil; dan

Kolaboratif mengandung arti empati, peduli, terbuka, berbagi (*sharing*), dan sinergi.

D. **Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Tujuan Kementerian Sekretariat Negara tahun 2020-2024 adalah:

1. **Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;**
2. **Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman; dan**
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara.**

E. Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Melalui kajian yang menyeluruh dan dengan memperhatikan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka Kementerian Sekretariat Negara menetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis yaitu:

1. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terwujudnya Hasil Analisis yang Berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”

- a. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
- b. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas.
- c. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif.
- d. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas.

2. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terselenggaranya Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang Berkualitas, Lancar, dan Aman”

Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan.

3. Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara”

- a. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi.
- b. Pengendalian internal yang efektif.
- c. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.
- d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Pencapaian sasaran-sasaran strategis diukur melalui IKU Kementerian Sekretariat Negara dengan target jangka menengah. Adapun keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, dan indikator sasaran strategis dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama
Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama
1. Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden
		2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional
			1. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden
			2. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden
		3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	3. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti
			1. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular
			2. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri
		3. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	

4. Penanganan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama
		4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	1. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri 2. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
2. Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden 2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden 3. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden*) 4. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	1. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi 2. Pengendalian internal yang efektif 3. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel 4. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Sistem Merit 3. Indeks Profesionalitas ASN 4. Hasil Evaluasi Kelembagaan 5. Indeks Maturitas SPBE Tingkat Maturitas SPIP 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Persentase capaian kinerja tugas khusus



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Merujuk pada RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sebagai periode pembangunan jangka menengah terakhir dari RPJPN 2005-2025, RPJMN ke IV ini menjadi rangkaian upaya mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sebagai berikut;

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Kementerian Sekretariat Negara, sebagai kantor Presiden (dan Wakil Presiden) RI, berperan dalam posisi sentral yang mensupervisi seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan serta memastikan tahapan pencapaiannya oleh segenap Kementerian dan Lembaga, termasuk isu gender dalam isu-isu prioritas K/L.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Secara teknis, dalam menjalankan fungsi kesekretariatan negara, peran strategis Kementerian Sekretariat Negara dimaksud dapat dilihat dari beberapa kondisi berikut: (1) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Sekretariat Negara memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan seluruh tugas pemerintahan negara, mulai dari supervisi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan hingga evaluasi hasil-hasil pelaksanaan program prioritas nasional; (2) Kementerian Sekretariat Negara menjadi filter terakhir dalam perumusan dan penetapan seluruh kebijakan nasional sebelum ditetapkan oleh Presiden; dan (3) Kementerian Sekretariat Negara juga ikut melaksanakan fungsi fasilitasi *debottlenecking* terhadap program-program pembangunan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Selain berperan sentral dalam memastikan suksesnya seluruh agenda pembangunan nasional, termasuk yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan, Kementerian Sekretariat Negara juga bertanggungjawab secara spesifik atas ketercapaian agenda pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yakni pada agenda pembangunan ke-2, yaitu “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan” dan agenda pembangunan ke-7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam, dan Transformasi Pelayanan Publik”, yang penjabarannya adalah sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”

Kementerian Sekretariat Negara menjadi salah satu instansi yang menjadi penanggung jawab dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), khususnya dalam hal penyiapan regulasi dan kerangka kebijakan tentang IKN. Sesuai RPJMN 2020-2024, pemindahan IKN ke luar Jawa diharapkan berdampak pada (1) akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI; (2) mendorong pembangunan Kawasan timur Indonesia untuk pemerataan wilayah; (3) mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris; (4) ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan; dan (5) mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek.

2. Agenda . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

2. Agenda Pembangunan “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”

Sebagai bentuk kontribusi Pemerintah Indonesia terhadap *capacity building* bagi negara-negara yang berkategori *Less Developed Countries (LDCs)*, sejak era 1980-an telah dilaksanakan program kerja sama selatan-selatan dalam bentuk pengembangan kapasitas pada berbagai bidang pembangunan praktikal, pengiriman tenaga ahli Indonesia untuk diperbantukan ke luar negeri, pengiriman barang pertanian, serta bantuan beasiswa dan pertukaran budaya.

Sebagai bagian dari koordinasi empat kementerian yang bertanggung jawab terhadap program kerja sama selatan-selatan Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara berperan sebagai fasilitator terselenggaranya kegiatan kerja sama selatan-selatan tersebut, sekaligus juga bertindak selaku pengelola dalam penyelenggaraan program pengembangan kapasitas bagi peserta luar negeri. Pendanaan kegiatan bersumber dari anggaran pemerintah maupun melalui mekanisme kerja sama triangular dengan mitra kerja sama pembangunan asing.

Dalam upaya memperkenalkan keahlian yang dimiliki Indonesia melalui program kerja sama selatan-selatan, sampai dengan saat ini, Kementerian Sekretariat Negara telah menjalin kerja sama dengan beberapa instansi dalam negeri, termasuk diantaranya dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, kegiatan strategis tersebut dikongkritkan sebagai salah satu agenda pembangunan nasional dalam bingkai penyelenggaraan Program Prioritas “Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri”, dengan Kegiatan Prioritas “Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional” dan Proyek Prioritas “Peningkatan Penggunaan Sumber-sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional”.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Seiring dengan arah kebijakan dan strategi bersifat nasional yang telah diuraikan diatas, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan langkah-langkah pelaksanaan berupa program indikatif. Program indikatif dirancang untuk memberikan dampak besar bagi pencapaian visi, misi,

tujuan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara yang telah ditetapkan.

Sebagai langkah awal penyusunan program dimaksud, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

1. Pengembangan cara berpikir dan cara kerja yang adaptif, inovatif, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal organisasi, melalui tata kelola berbasis manajemen resiko yang didukung teknologi mutakhir.
Langkah konkret strategi ditekankan pada transformasi digital, meliputi perubahan pola pikir dan cara kerja analog menjadi digital termasuk pengembangan talenta agar memiliki karakter pembelajar yang kuat, pembangunan Kantor Kementerian Sekretariat Negara berbasis teknologi terkini, dan pengambilan kebijakan yang didasarkan pada data (*data driven policy making*).
2. Penguatan kelembagaan dan penyempurnaan bisnis proses dengan dukungan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi.
Langkah konkret strategi ditekankan pada deregulasi dan debirokratisasi, serta pengembangan ekosistem inovasi.
3. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara, melalui:
 - a. pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan berkesinambungan;
 - b. penerapan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen SDM secara terpadu;
 - c. penataan kelembagaan yang dilakukan melalui: pemetaan kembali tugas fungsi sesuai mandat perundang-undangan dan sinkronisasi tugas, fungsi, dan pemisahan kewenangan yang makin jelas antara unit-unit organisasi di lingkungan Kantor Kepresidenan; dan
 - d. perluasan penerapan *e-government* dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan, komunikasi, dan berbagi.

Arah kebijakan dan strategi tersebut di atas selanjutnya dijabarkan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Program tersebut merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Kementerian Sekretariat Negara untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dukungan penguatan teknologi informasi dan telekomunikasi mutlak diperlukan dalam mengoperasionalkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara. Untuk itu, diperlukan dukungan sumber daya termasuk alokasi anggaran sebagaimana terperinci pada uraian kebutuhan kerangka pendanaan tahun 2021-2024 di bawah.

Setelah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi, serta hasil perumusan restrukturisasi program bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020-2024 melaksanakan 2 (dua) program, yaitu:

- (1) Program Dukungan Manajemen; dan
- (2) Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan strategi dan untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara yang telah ditetapkan, diperlukan beberapa produk regulasi yang bersifat internal, namun tidak menutup kemungkinan adanya regulasi yang akan mengatur secara eksternal yang disusun sebagai respon dari dinamika pembangunan yang terus berkembang selama berlangsungnya masa bakti Presiden dan Wakil Presiden.

Produk regulasi internal tersebut dituangkan dalam bentuk penyusunan/penyempurnaan RPermensesneg/Permensesneg serta Standar Pelayanan/SOP untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran strategis yang ditetapkan, yang terperinci sebagai berikut.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

**KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2020-2024**

A. Tahun 2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Penyusunan/Penyempurnaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	2020

2. Penyusunan/Penyempurnaan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	Penyusunan/ Penyempurnaan Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan Standar Pelayanan dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	2020
3	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan Perpres tentang Kemensetneg	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden	2020

5. Deputi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	
4	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	2020
5	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk Pengelolaan Arsip di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Sekretariat Kementerian	1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan 2. Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2020
6	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Pengelolaan Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden serta Bantuan Kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	1. Sekretariat Presiden 2. Sekretariat Wakil Presiden	1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan 2. Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2020



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
7	Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai di Lingkungan Istana/Kantor Kepresidenan	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Sekretariat Kementerian	1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan 2. Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2020
8	Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Rombongan yang Diikutsertakan pada Perjalanan Dinas Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	1. Sekretariat Presiden 2. Sekretariat Wakil Presiden	1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan 2. Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2020
9	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Sekretariat Militer Presiden	1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan 2. Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2020

B. Tahun . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

B. Tahun 2021-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Penyusunan/ Penyempurnaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	2021
2	Penyusunan/ Penyempurnaan Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan Standar Pelayanan dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden	2021

4. Sekretariat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	
3	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum	2021

6. Deputi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	
4	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang, dan Rancangan Peraturan Presiden	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum	1. Kementerian Pemrakarsa 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2021
5	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden	2021

5. Deputi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	
6	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Kompetensi Teknis di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	2021

7. Penyempurnaan . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
7	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat	2021
8	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	2021

9. Penyempurnaan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
9	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Presiden 2. Sekretariat Wakil Presiden 3. Sekretariat Militer Presiden	2021
10	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Penegakan Disiplin Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Presiden 2. Sekretariat Wakil Presiden 3. Sekretariat Militer Presiden	2021
11	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Penangananan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	- Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kemensetneg. - Terdapat sistem/aplikasi dalam penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri (SIMPEL)	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2021

12. Penyempurnaan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
12	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none">- Perlu disesuaikan dengan:<ul style="list-style-type: none">a. peraturan-perundang-undangan; danb. perubahan organisasi dan tata kerja Kemensetneg.- Terdapat sistem/aplikasi dalam penanganan tata naskah dinas elektronik (SPDE Open)	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2021
13	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: <ul style="list-style-type: none">a. peraturan-perundang-undangan; danb. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	2021
14	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Grand Design Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: <ul style="list-style-type: none">a. Peraturan perundang-undangan; danb. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2021



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
15	Penyusunan/Penyempurnaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	2022
16	Penyusunan/Penyempurnaan Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan Standar Pelayanan dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden	2022

5. Deputi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	
17	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penanganan Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Sekretariat Kabinet	2022
18	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden dan Rancangan Keputusan Presiden	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum	1. Kementerian Pemrakarsa 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2022



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
19	Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2022
20	Penyusunan/Penyempurnaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	2023

21. Penyusunan/Penyempurnaan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
21	Penyusunan/Penyempurnaan Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan Standar Pelayanan dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	2023
22	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden	2023

5. Deputi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	
23	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kemensetneg.	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2023
24	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Honorarium, Uang Lembur, Uang Makan, dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2023

25. Penyusunan/Penyempurnaan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
25	Penyusunan/ Penyempurnaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	2024
26	Penyusunan/ Penyempurnaan Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan Standar Pelayanan dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden	2024

5. Deputi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	
27	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Perlu disesuaikan dengan: a. peraturan-perundang-undangan; dan b. perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	2024



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
28	Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Capaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	2024
29	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	<ul style="list-style-type: none">- Perlu disesuaikan dengan:<ul style="list-style-type: none">a. peraturan-perundang-undangan; danb. perubahan organisasi dan tata kerja Kemensetneg.- Terdapat sistem/aplikasi dalam penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	2024

D. Kerangka . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

D. Kerangka Kelembagaan

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2020-2024 perlu didukung oleh fungsi dan struktur organisasi, tata laksana, dan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien.

1. Fungsi dan Struktur Organisasi

Kementerian Sekretariat Negara merupakan kementerian yang menangani **urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah**. Hal ini berdasarkan kedudukan Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dari Kementerian yang kewenangannya telah dipetakan dalam kluster III, sesuai amanat Pasal 4 Ayat (2) huruf c dan Pasal 5 Ayat (3) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

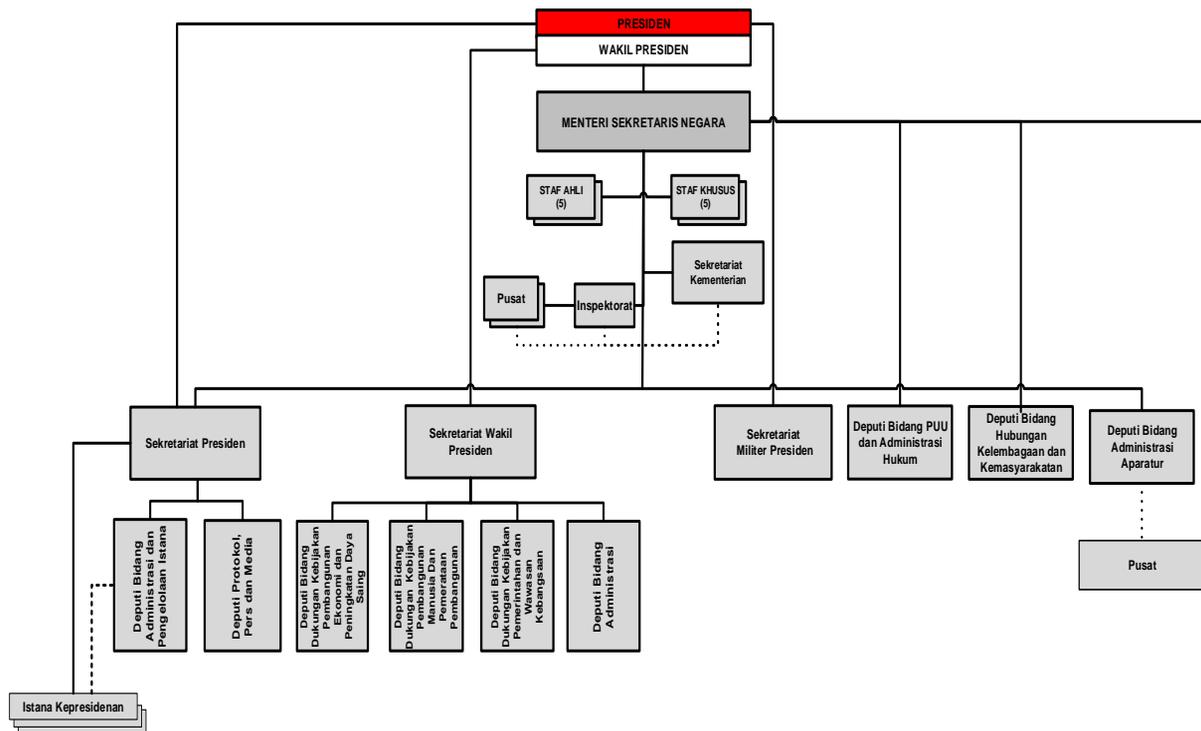
Fungsi penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah sebagaimana tersebut di atas adalah yang terkait dengan urusan pemerintahan **di bidang kesekretariatan negara**. Dalam hal ini, Kementerian Sekretariat Negara adalah “Sekretaris” bagi Presiden sebagai Kepala Negara yang memainkan peran sebagai pintu gerbang terakhir dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis secara langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan penataan kelembagaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif dan efisien telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara, dengan bagan struktur organisasi berikut.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -



Struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara tahun 2020-2024 lebih ramping karena adanya pengalihan Jabatan Administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi Jabatan Fungsional mengikuti kebijakan Presiden yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

2. Tata Laksana

Untuk menggambarkan perincian pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata laksana antar unit organisasi, diperlukan adanya penyusunan/penyempurnaan regulasi internal, peta proses bisnis, standar pelayanan, dan SOP, serta kebijakan lain sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perubahan peraturan perundang-undangan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis, termasuk perubahan karena bencana alam dan bencana nonalam seperti adanya pandemi Covid-19 saat ini.

3. Pengelolaan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

3. Pengelolaan SDM

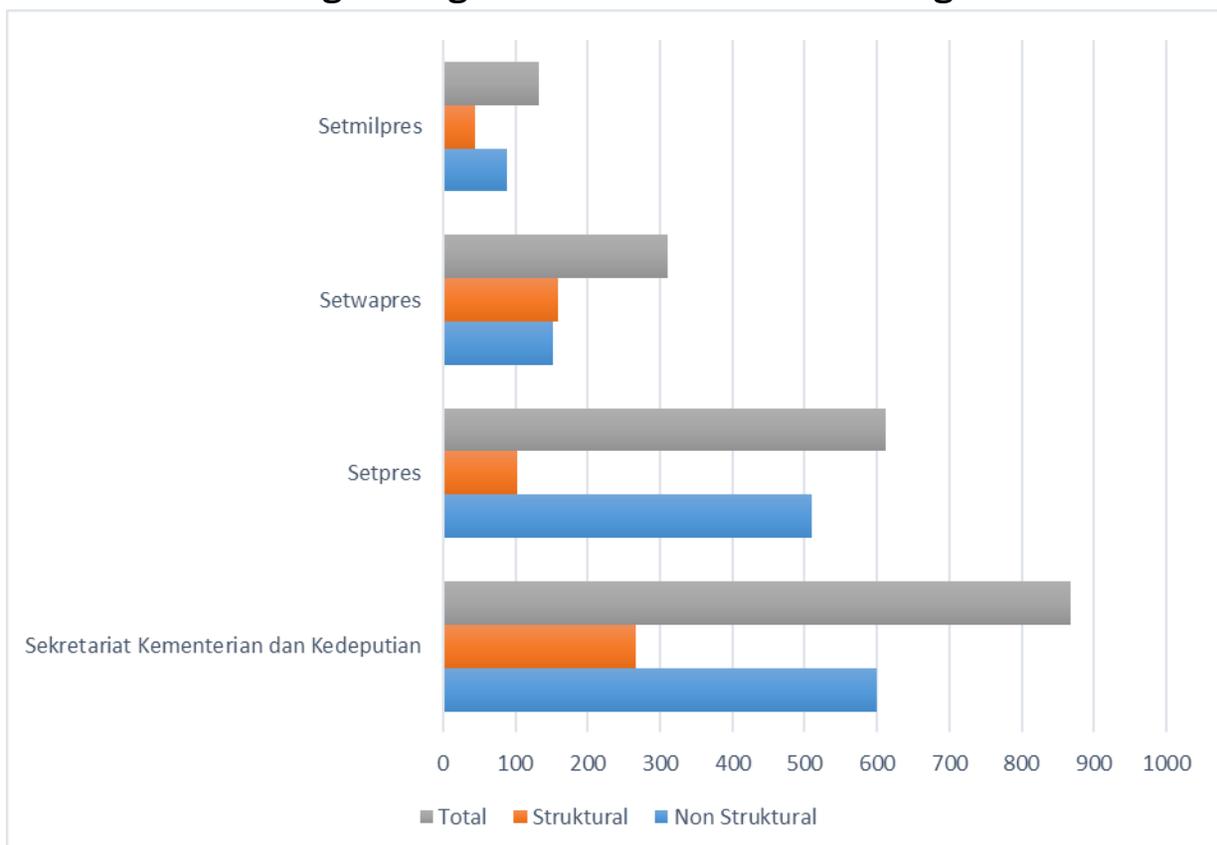
a. Kondisi SDM Saat Ini

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara didukung oleh 1.922 orang pegawai (data per 31 Maret 2020) yang terdiri dari 1.211 orang laki-laki (63,01%) dan 711 orang perempuan (36,99%).

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Kementerian Sekretariat Negara didominasi oleh pegawai dengan pendidikan D4/S1 ke atas, yaitu sejumlah 57,65%. Adapun pegawai dengan pendidikan D3 sejumlah 9,16% dan pegawai dengan pendidikan D2 ke bawah sejumlah 33,19%. Berdasarkan usia, Kementerian Sekretariat Negara didominasi pegawai berusia 45 tahun ke bawah, yaitu sejumlah 59,89%.

Berikut gambaran perincian demografi pegawai yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara.

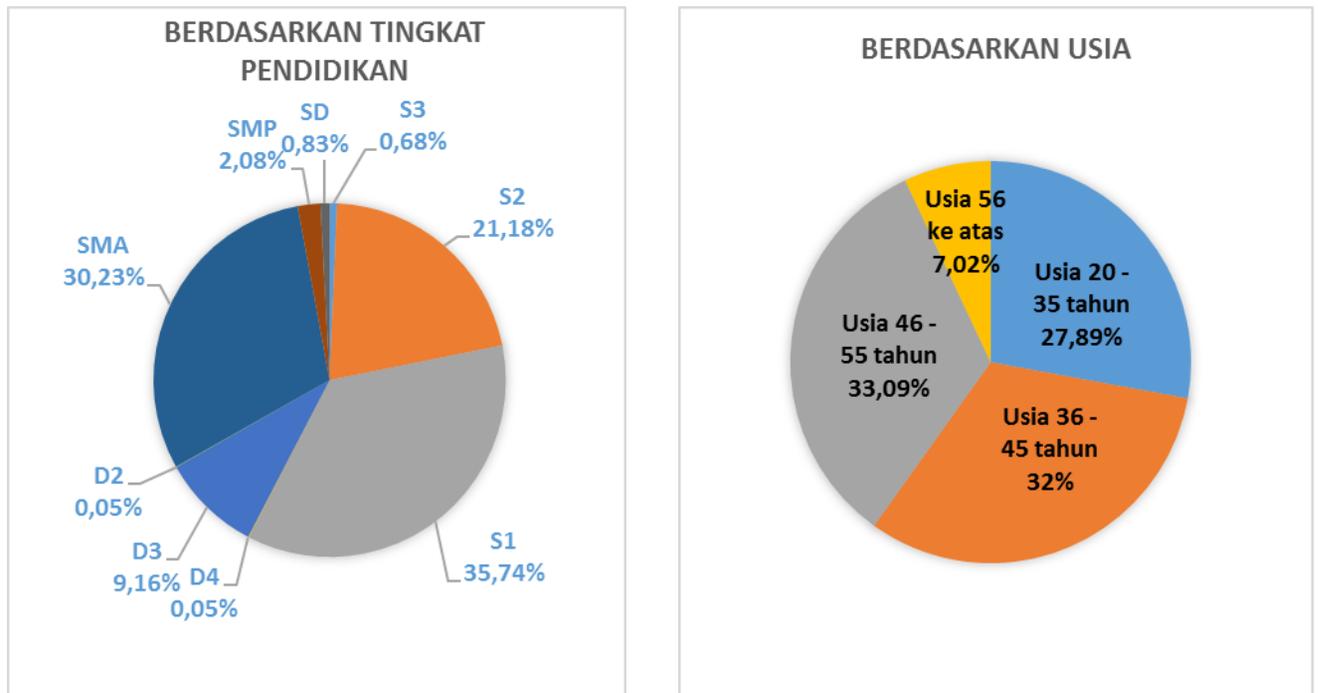
Grafik 3.1
Demografi Pegawai Berdasarkan Satuan Organisasi



Grafik 3.2 . . .



Grafik 3.2
Demografi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia



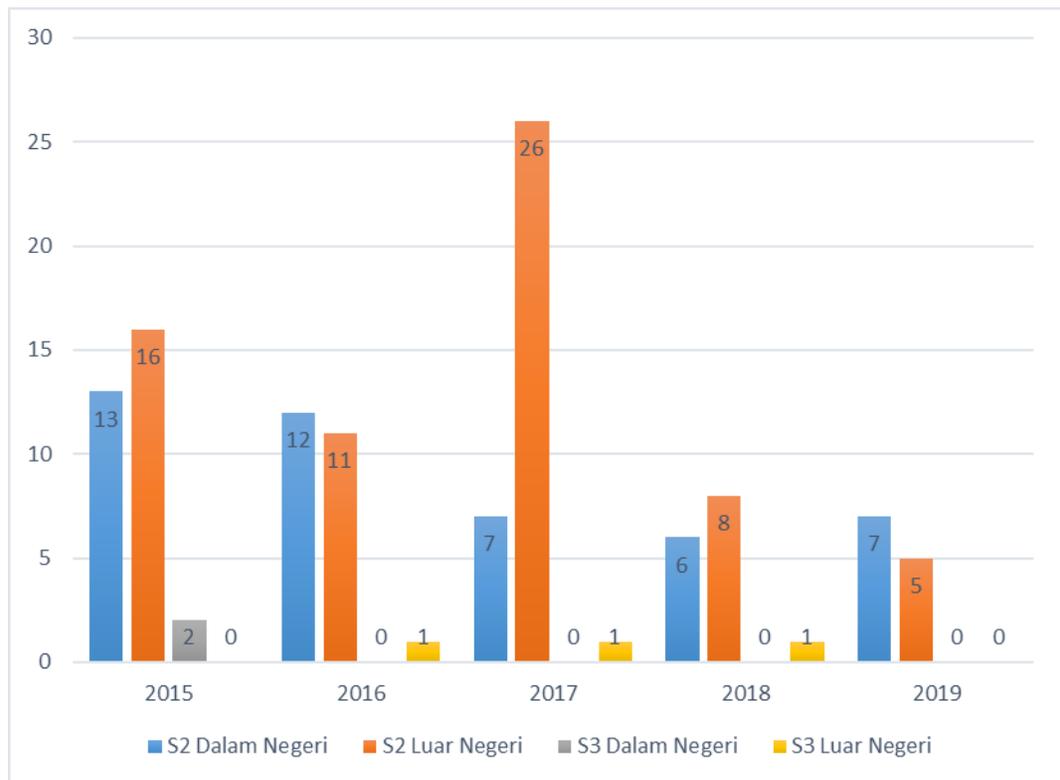
Sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sebagai penggerak pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, sepanjang tahun 2015-2019, Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan berupa rintisan pendidikan gelar, baik dalam negeri maupun luar negeri dan kegiatan pelatihan berupa pelatihan dasar, struktural kepemimpinan, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial kultural, serta kegiatan-kegiatan seminar/workshop. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut diselenggarakan sesuai analisis kebutuhan pengembangan SDM.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Grafik 3.3
Jumlah Pegawai Penerima Beasiswa Pendidikan Gelar
Tahun 2015-2019



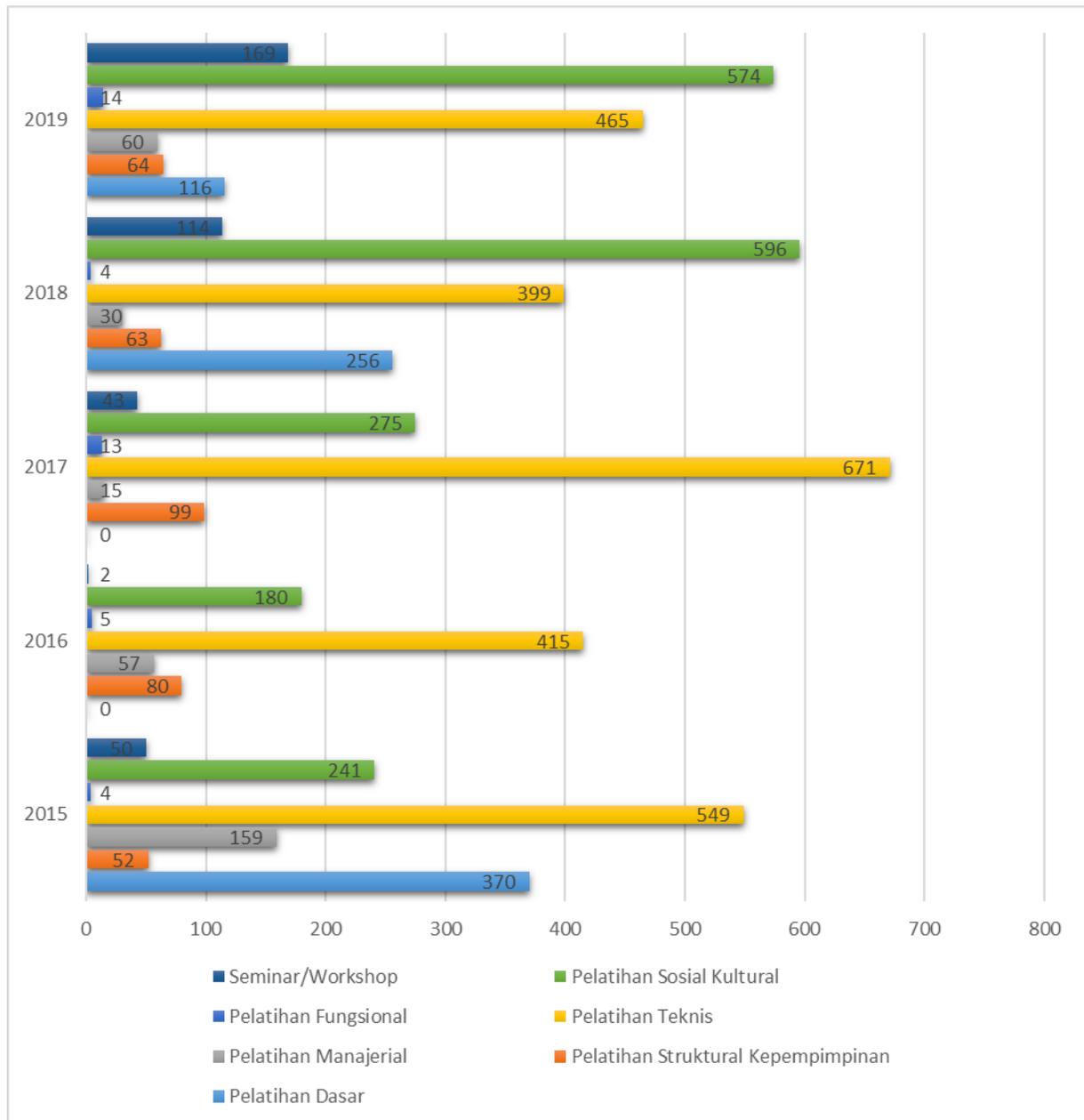
Grafik 3.4 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Grafik 3.4
Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan
Tahun 2015-2019



Dalam kurun waktu tahun 2019, jumlah pegawai yang mendapatkan program pengembangan kompetensi hanya sekitar 71 persen dari total pegawai. Persentase tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan kebutuhan pegawai secara minimal yakni 20 jam pelajaran per tahun. Oleh karenanya, Kementerian Sekretariat Negara perlu

mengidentifikasi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

mengidentifikasi dan mengadopsi bentuk kreativitas pengembangan kompetensi yang menjadi investasi tepat guna dan tepat sasaran bagi peningkatan kapabilitas SDM selanjutnya.

Selain itu, pertimbangan terhadap kemungkinan kejadian *force majeure* sebagaimana halnya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 juga layak untuk menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan kompetensi. Pemanfaatan model pembelajaran digital menjadi alternatif yang paling *feasible* sebagai langkah antisipatif bagi upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai.

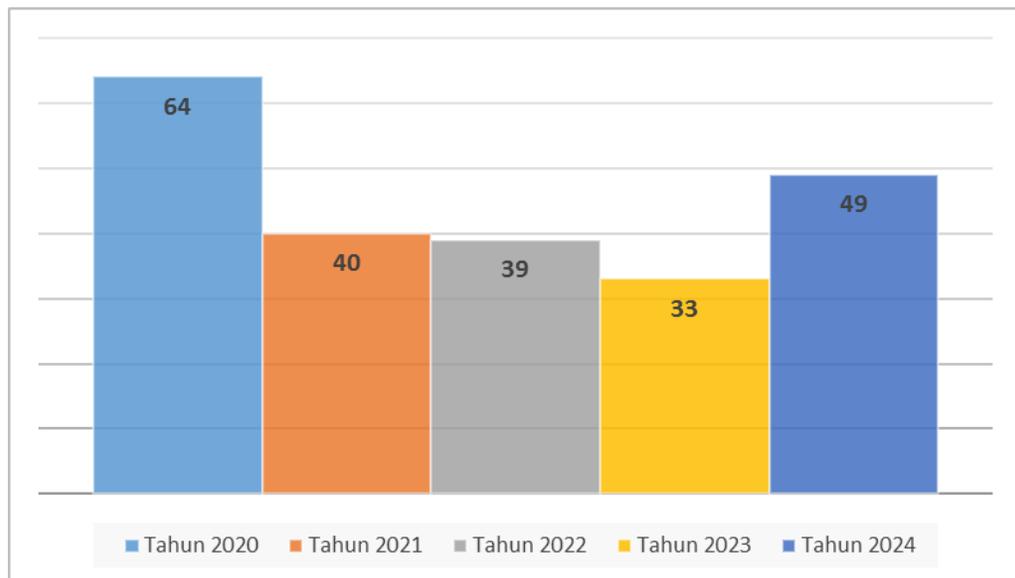
b. Kebutuhan SDM Aparatur 2020-2024

Dengan adanya penajaman fungsi organisasi, kebutuhan kualifikasi dan kompetensi pegawai Kementerian Sekretariat Negara dipetakan berbasis Sasaran Strategis yang akan dicapai. Proporsionalitas target dan anggaran pengembangan kompetensi, yang nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan *Human Capital Development Plan* Kementerian Sekretariat Negara akan memuat secara terperinci kebutuhan dimaksud dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang sudah dimiliki oleh pegawai sebelumnya. Lebih lanjut, aktivitas pengembangan kompetensi akan didasarkan pada *Framework* Pengembangan Kompetensi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen *Human Capital Development Plan* Kementerian Sekretariat Negara.

Secara kuantitas, Kementerian Sekretariat Negara memperhitungkan kebutuhan *human capital* yang disinergikan dengan arah kebijakan *zero growth*. Berikut perkiraan kebutuhan SDM Aparatur Kementerian Sekretariat Negara tahun 2020-2024.



Grafik 3.6
Jumlah Kebutuhan Pegawai
Tahun 2020-2024



*) Jumlah kebutuhan pegawai sama dengan jumlah pegawai pensiun (*zero growth*). Perhitungan kebutuhan pegawai tiap tahunnya akan disesuaikan dengan kebijakan nasional pada dokumen perencanaan kebutuhan SDM tahunan.

c. Kebijakan Umum Pengelolaan SDM

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prakondisi yang harus dimiliki oleh instansi publik guna menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit sebagai rujukan utama dalam kebijakan dan manajemen ASN merupakan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mendasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Kementerian Sekretariat Negara telah mengambil berbagai langkah kebijakan yang konstruktif dalam mendukung terwujudnya manajemen ASN secara adil dan terbuka. Hal itu diwujudkan, antara lain, melalui penerapan sistem merit yang menyasar target penyempurnaan formulasi dan implementasi kebijakan serta pengembangan aktivitas pengelolaan SDM.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Penerapan sistem merit meliputi penyusunan dan pengelolaan kegiatan dalam rangkaian manajemen sumber daya manusia termasuk di antaranya manajemen kinerja, manajemen kompetensi, manajemen talenta, dan manajemen karier. Pelaksanaan manajemen karir dilakukan melalui penetapan dan pengukuran pegawai berdasarkan parameter kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak dalam proses rekrutmen serta promosi jabatan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Hal ini juga menjadi sangat penting menghadapi fenomena komposisi PNS Kementerian Sekretariat Negara yang berpusat pada pada level tengah di piramida SDM yang tentunya memerlukan strategi khusus untuk program retensi dan perumusan pola kariernya, dan juga perkembangan isu terkini seperti pengalihan Jabatan Administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi Jabatan Fungsional dan akan dikembangkannya cara kerja baru sebagai terobosan penting dalam mendorong budaya kerja yang lebih adaptif dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi.

Pengembangan berkelanjutan terhadap penerapan sistem merit adalah salah satu fokus utama kebijakan Kementerian Sekretariat Negara saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Perkembangan diskursus dan wacana pengelolaan SDM yang makin berkualitas baik secara lokal maupun global menjadi inspirasi kebutuhan penyempurnaan berkelanjutan terhadap kebijakan manajemen ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Dengan diterapkannya manajemen ASN berbasis merit, diharapkan bahwa SDM di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara akan terus bertumbuh menjadi profesional yang kompetitif serta memiliki semangat pembelajar dan ketahananmalangan yang tinggi terhadap ide-ide inovasi yang solutif dan kontributif dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi dan misi Kementerian Sekretariat Negara.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja Kementerian Sekretariat Negara berisikan penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2020-2024. Kebutuhan pendanaan untuk mencapai hasil yang akan dicapai tersebut dijelaskan pada kerangka pendanaan tahun 2020-2024.

Kebutuhan anggaran pada kerangka pendanaan Kementerian Sekretariat Negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Satuan Organisasi dan Unit Kerja Kementerian Sekretariat Negara, tetapi juga meliputi beberapa Satuan Kerja (Satker) pada lembaga yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Struktur Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) terdiri dari 5 Unit Organisasi dengan masing-masing Satker yang terdiri dari:

1. Sekretariat Negara, yang meliputi:
 - a. Satker Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. Satker Istana Kepresidenan Jakarta;
 - c. Satker Istana Kepresidenan Bogor;
 - d. Satker Istana Kepresidenan Cipanas;
 - e. Satker Istana Kepresidenan Yogyakarta;
 - f. Satker Istana Kepresidenan Tampaksiring-Bali;
 - g. Satker Sekretariat Wakil Presiden;
 - h. Satker Sekretariat Militer Presiden
 - i. Satker Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; dan
 - j. Satker Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.
2. Pasukan Pengamanan Presiden, yang meliputi Satker Pasukan Pengamanan Presiden;
3. Dewan Pertimbangan Presiden, yang meliputi Satker Dewan Pertimbangan Presiden;
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang meliputi Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang mulai tahun 2021 menjadi bagian anggaran tersendiri;
5. Kantor Staf Presiden, yang meliputi Satker Kantor Staf Presiden.

A. Target Kinerja

Target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Tabel 4.1
Target Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Tujuan: Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis:						
a. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%	100%	100%	100%
b. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	1. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden*)	N/A	2,72 Skala 4	2,84 Skala 4	2,95 Skala 4	3,03 Skala 4
	2. Indeks Kualitas Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden*)	N/A	3,04 Skala 4	3,28 Skala 4	3,42 Skala 4	3,58 Skala 4

3. Persentase . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	3. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%	46%	47%	48%	50%
c. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	1. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular*)	N/A	3,1 Skala 5	3,2 Skala 5	3,3 Skala 5	3,4 Skala 5
	2. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	N/A	3,1 Skala 5	3,2 Skala 5	3,3 Skala 5	3,4 Skala 5
	3. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri *)	N/A	3,58 Skala 5	3,6 Skala 5	3,62 Skala 5	3,64 Skala 5
d. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	1. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri*)	N/A	2,83 Skala 4	2,91 Skala 4	3 Skala 4	3,09 Skala 4
	2. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan*)	N/A	2,92 Skala 4	2,96 Skala 4	3 Skala 4	3,04 Skala 4
2. Tujuan: Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis:						
Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolanan, pers media, dokumentasi dan diseminasi informasi, serta koordinasi pengamanan	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73 Skala 6	4,78 Skala 6	4,83 Skala 6	4,83 Skala 6	4,88 Skala 6
	2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolanan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,63 Skala 6	4,68 Skala 6	4,73 Skala 6	4,73 Skala 6	4,78 Skala 6
	3. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden*)	4,53 Skala 6	4,58 Skala 6	4,63 Skala 6	4,63 Skala 6	4,68 Skala 6

4. Indeks . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	4. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden*)	N/A	4,25 Skala 6	4,27 Skala 6	4,3 Skala 6	4,32 Skala 6
3. Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis:						
a. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	65,63	65,69	65,75	65,81
	2. Indeks Sistem Merit	N/A	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	3. Indeks Profesionalitas ASN	N/A	64	68	72	76
	4. Hasil Evaluasi Kelembagaan	N/A	P4 dari P5 (65)	P4 dari P5 (70)	P4 dari P5 (75)	P4 dari P5 (79)
	5. Indeks Maturitas SPBE	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik
b. Pengendalian internal yang efektif	Tingkat Maturitas SPIP	N/A	3,17 (Level 3)	3,22 (Level 3)	3,27 (Level 3)	3,32 (Level 3)
c. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	N/A	76,04 (BB)	76,08 (BB)	76,12 (BB)	76,16 (BB)
	2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	N/A	WTP	WTP	WTP	WTP
d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase capaian kinerja tugas khusus	N/A	100%	100%	100%	100%

Catatan: . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Catatan:

- Dalam hal terdapat perubahan target tahunan akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian Sekretariat Negara.
- Indikator dengan tanda *) merupakan indikator sasaran strategis baru yang mulai diterapkan pada tahun 2021.
- Indikator dan target kinerja tahun 2020 lebih rinci pada tabel 4.3.

B. Kerangka . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

B. Kerangka Pendanaan

Guna menyukseskan program nasional berupa perubahan sistem penganggaran pada belanja negara (redesain sistem penganggaran), Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan restrukturisasi unit organisasi, program, dan kegiatan. Restrukturisasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan fleksibilitas anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara yang lebih optimal dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, melaksanakan 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Program 1 merupakan program generik, yang dilaksanakan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan Program 2 merupakan program teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Khusus Unit Organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada target kinerja dan kerangka pendanaan di Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) hanya untuk tahun 2020. Adapun tahun 2021-2024, anggaran LPSK dialokasikan pada Bagian Anggaran tersendiri.

Dalam rangka pencapaian target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan pada Kementerian Sekretariat Negara dalam perspektif jangka menengah pada RPJMN 2020-2024 dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) Fungsional, PNBP BLU, dan Hibah Luar Negeri (HLN).

Terkait HLN, pada tahun 2019 Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan kepercayaan untuk menyukseskan salah satu program prioritas nasional, yaitu melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan anak kerdil atau *stunting* (P2AK). Pelaksanaan strategi nasional tersebut melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga yang terkait penanganan program tersebut. Koordinator teknis kegiatan P2AK pada Kementerian Sekretariat Negara dilaksanakan oleh Sekretariat Wakil Presiden melalui peningkatan kapasitas pelaksana program pada



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

pusat dan daerah dalam melakukan monitoring, koordinasi dan pelaksanaan strategi P2AK.

Pembiayaan untuk pelaksanaan koordinasi dan monitoring P2AK diperoleh dari dana hibah Bank Dunia melalui program *Global Financing Facility (GFF) for Investing In Nutrition and Early Years (INEY)* sebesar USD 20 juta yang penyalurannya dilakukan secara bertahap sesuai kontrak mulai tahun 2018 sampai dengan 2021. Dari jumlah USD20 juta, Kementerian Sekretariat Negara hingga tahun 2021 diproyeksikan mengelola sebesar USD12 juta, sedangkan sisanya masing-masing sebesar USD4 juta dikelola Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.

Kerangka pendanaan Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2020-2024

KODE	PROGRAM/VO/SATKER	KERANGKA PENDANAAN TA 2020 - 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
01	Dukungan Manajemen	1.935.720.151.000	1.203.370.625.000	1.523.269.616.000	1.655.189.032.000	1.816.662.391.000
07.01	UO Sekretariat Negara	1.093.804.603.000	945.595.175.000	1.088.069.438.000	1.194.696.015.000	1.319.629.537.000
	Satker Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	715.768.991.000	623.832.321.000	750.218.442.000	839.952.469.000	943.708.741.000
	Satker BLU PPK Gelora Bung Karno	250.112.500.000	156.012.349.000	163.812.966.000	172.003.614.000	184.043.867.000
	Satker BLU PPK Kemayoran	127.923.112.000	165.750.505.000	174.038.030.000	182.739.932.000	191.876.929.000
07.03	UO Setpres (5 Satker)	451.197.546.000	77.283.700.000	192.509.800.000	200.818.000.000	211.191.500.000
07.04	UO/Satker Sekretariat Wakil Presiden	144.663.761.000	52.469.230.000	68.150.940.000	76.074.390.000	92.672.020.000
07.05	UO/Satker Sekretariat Militer Presiden	6.341.240.000	9.843.000.000	10.828.000.000	11.910.000.000	13.101.000.000
07.06	UO/Satker Paspampres	75.719.012.000	4.336.743.000	4.347.636.000	4.358.637.000	4.369.749.000
07.07	UO/Satker Dewan Pertimbangan Presiden	32.850.870.000	31.477.761.000	39.850.370.000	41.842.890.000	43.935.040.000
07.09	UO/Satker LPSK	54.558.755.000	-	-	-	-
07.10	UO/Satker Kantor Staf Presiden	76.584.364.000	82.365.016.000	119.513.430.000	125.489.100.000	131.763.550.000
06	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	86.372.462.000	879.360.340.000	1.659.603.216.000	1.836.098.969.000	1.917.797.053.000
07.01	UO Sekretariat Negara	8.530.995.000	167.032.256.000	673.636.003.000	754.149. 910.000	830.171.735.000
	Satker Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	8.530.995.000	167.032.256.000	673.636.003.000	754.149.910.000	830.171.735.000
07.03	UO Setpres (5 Satker)	-	451.775.600.000	585.321.700.000	642.830.000.000	701.522.700.000

07.04 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

KODE	PROGRAM/UO/SATKER	KERANGKA PENDANAAN TA 2020 - 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
07.04	UO/Satker Sekretariat Wakil Presiden	52.963.493.000	130.836.400.000	162.775.090.000	167.567.500.000	157.975.650.000
07.05	UO/Satker Sekretariat Militer Presiden	24.877.974.000	32.569.000.000	36.020.000.000	37.759.000.000	39.884.000.000
07.06	UO/Satker Paspampres	-	90.297.447.000	164.795.643.000	194.885.029.000	147.390.058.000
07.07	UO/Satker Dewan Pertimbangan Presiden	-	2.454.420.000	12.308.290.000	12.923.710.000	13.569.900.000
07.10	UO/Satker Kantor Staf Presiden	-	4.395.217.000	24.746.490.000	25.983.820.000	27.283.010.000
	JUMLAH	2.022.092.613.000	2.082.730.965.000	3.182.872.832.000	3.491.288.001.000	3.734.459.444.000
	INDIKASI SUMBER PENDANAAN					
	RM	1.591.624.960.000	1.704.602.490.000	2.842.907.215.000	3.134.429.834.000	3.356.424.027.000
	RMP	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-
	PNBP	379.216.303.000	323.877.475.000	339.965.617.000	356.858.167.000	378.035.417.000
	HIBAH LUAR NEGERI	50.251.350.000	53.251.000.000	-	-	-

Tabel 4.3 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Tabel 4.3
Rincian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020–2024

A. Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA				2.022.092.613	
	1. Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden				- UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Satker BLU PPKGBK 6. Satker BLU PPKK - UO/Satker Paspampres - UO/Satker Dewan Pertimbangan Presiden - UO/Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban - UO/Satker Kantor Staf Presiden

Indikator . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis				
	- <i>Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden</i>		100%		1. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing 2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan 3. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan 4. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
	- <i>Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden</i>		100%		Deputi Bidang PUU dan Administrasi Hukum
	- <i>Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden</i>		100%		Deputi Bidang PUU dan Administrasi Hukum
	- <i>Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden</i>		100%		Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
	- <i>Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden</i>		100%		Deputi Bidang Administrasi Aparatur

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden</i>		100%		Sekretariat Militer Presiden
	- <i>Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti</i>		45%		Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
	- <i>Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara</i>		3 Skala 5		Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	2. Sasaran Strategis Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden				- UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Satker BLU PPKGBK 6. Satker BLU PPKK - UO/Satker Paspampres - UO/Satker Dewan Pertimbangan Presiden - UO/Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban - UO/Satker Kantor Staf Presiden
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis				
	- <i>Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden</i>		4,73 Skala 6		

-Indeks . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden		4,73 Skala 6		
	- Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman		100%		
Program 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara				1.935.720.151	- UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden 5. Satker BLU PPKGBK 6. Satker BLU PPKK - UO/Satker Paspampres - UO/Satker Dewan Pertimbangan Presiden - UO/Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban - UO/Satker Kantor Staf Presiden
	Sasaran Program 1.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia				Deputi Bidang Administrasi Aparatur
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- Indeks Sistem Merit		Kategori "baik" (250-324)		
	- Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		3,6 Skala 5		

-Persentase . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase pegawai Kementerian Sekretariat Negara yang belum terpenuhi haknya untuk mendapatkan program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebanyak 20 Jam Pelatihan pada tahun 2020</i>		60%		
	Sasaran Program 1.2. Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja				Deputi Bidang Administrasi Aparatur
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori Baik</i>		90%		
	- <i>Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/ satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)</i>		50%		
	Sasaran Program 1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada Menteri Sekretaris Negara di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan				Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disetujui instansi terkait</i>		100%		
	- <i>Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara</i>		3 Skala 4		
	- <i>Kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara</i>		WTP		

-Rata-rata . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan naskah dinas, dokumen/arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		3 Skala 4		
	Sasaran Program 1.4. Tersedianya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas				Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Indikator Kinerja Program				
	- Indeks kepuasan layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan kementerian Sekretariat Negara		3 Skala 4		
	Sasaran Program 1.5 Tersedianya layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan pejabat negara yang berkualitas				Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Indikator Kinerja Program				
	- Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara		3 Skala 4		
	- Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara tertentu		3 Skala 4		
	Sasaran Program 1.6. Meningkatnya kualitas pengawasan				Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara
	Indikator Kinerja Program				
	- Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti		100%		

-Persentase . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan</i>		100%		
	- <i>Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara</i>		Level 3		
	- <i>Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara</i>		Level 3		
	Sasaran Program 1.7. Kerjasama dengan lembaga/badan usaha yang optimal <i>Indikator Kinerja Program</i>				BLU PPKK
	- <i>Persentase penyelesaian kontrak kerja sama dengan lembaga/badan usaha</i>		100%		
	- <i>Jumlah kontrak kerja sama operasional dengan lembaga/badan usaha</i>		3 Kontrak		
	Sasaran Program 1.8. Pengelolaan kawasan Kemayoran yang modern berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) <i>Indikator Kinerja Program</i>				BLU PPKK
	- <i>Persentase penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU</i>		100%		
	Sasaran Program 1.9. Pendapatan layanan yang signifikan <i>Indikator Kinerja Program</i>				BLU PPKK
	- <i>Realisasi PNBPN</i>		Rp159,9 Miliar		

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Program 1.10. Pengelolaan keuangan BLU yang sehat				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional</i>		50%		
	Sasaran Program 1.11. Kepuasan masyarakat pengguna layanan yang tinggi				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		Sangat Baik (4,01 Skala 5)		
	Sasaran Program 1.12. Layanan prima masyarakat terkait pemeliharaan dan pengamanan kawasan				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait pemeliharaan dan pengamanan kawasan</i>		100%		
	Sasaran Program 1.13. Inovasi pelayanan berbasis aplikasi				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase layanan yang selesai diproses melalui aplikasi C- Mantap</i>		70%		

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Program 1.14. Peningkatan pengelolaan Badan Layanan Umum yang berkesinambungan				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan</i>		85%		
	Sasaran Program 1.15. Peningkatan Pendapatan Pengelolaan Kawasan				BLU PPKGBK
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Pertumbuhan Tingkat Okupansi</i>		3%		
	Sasaran Program 1.16. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan				BLU PPKGBK
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase Persepsi Positif Masyarakat</i>		70%		
	Sasaran Program 1.17. Tercapainya Target PNB				BLU PPKGBK
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Realisasi PNB</i>		Rp294,25 Miliar		

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Program 1.18. Rasio Keuangan yang Sehat				BLU PPKGBK
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	<i>- Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional</i>		50%		
	Sasaran Program 1.19. Pengembangan Sistem Informasi BLU				BLU PPKGBK
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	<i>- Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU</i>		100%		
	Sasaran Program 1.20. Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan				BLU PPKGBK
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	<i>- Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai ketentuan</i>		80%		
	Sasaran Program 1.21. Meningkatnya kelancaran aktivitas Presiden melalui dukungan kerumahtanggaan				Sekretariat Presiden Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	<i>- Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden</i>		4,95 Skala 6		
	<i>- Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana-istana Kepresidenan di Daerah</i>		4,95 Skala 6		

-Indeks . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Indeks kepuasan pengguna layanan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian		4,95 Skala 6		
	- Indeks kepuasan pengguna layanan sarana dan prasarana serta dukungan umum lainnya		4,95 Skala 6		
	- Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan jamuan, seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan, serta kerumahtanggaan lainnya		4,95 Skala 6		
	- Persentase pengelolaan dana operasional Presiden dan bantuan kemasyarakatan		4,95 Skala 6		
	Sasaran Program 1.22. Meningkatnya kelancaran aktivitas Presiden melalui dukungan keprotokolan, pers, dan media				Sekretariat Presiden Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden		4,95 Skala 6		
	- Indeks kepuasan pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden		4,95 Skala 6		
	- Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan pers, media, dan informasi		4,95 Skala 6		
	- Persentase pendokumentasian kegiatan Presiden dan/atau Isteri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan penting lainnya yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat Presiden		100%		
	- Persentase pengelolaan perpustakaan kepresidenan yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat Presiden		100%		

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Program 1.23. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtangaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden				Sekretariat Wakil Presiden
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangaan kepada Wakil Presiden</i>		4,5 Skala 5		
	- <i>Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden</i>		4,5 Skala 5		
	- <i>Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan</i>		100%		
	- <i>Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan</i>		100%		
	- <i>Jumlah laporan pengelolaan dana operasional dan bantuan masyarakatan Wakil Presiden</i>		2 laporan		
	- <i>Jumlah laporan program anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun</i>		2 dokumen		
	Sasaran Program 1.24. Meningkatnya kualitas layanan dan administrasi umum Sekretariat Militer Presiden				Sekretariat Militer Presiden
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Indeks kepuasan pengguna layanan internal Sekretariat Militer Presiden</i>		3,9 Skala 5		

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Program 1.25. Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden				Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden</i>		85%		
	Sasaran Program 1.26. Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden				Sekretariat Kantor Staf Presiden
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan pimpinan Kantor Staf Presiden</i>		100%		
	- <i>Persentase ketersediaan up time sistem dan aplikasi kritikal bagi Kantor Staf Presiden</i>		100%		
	- <i>Persentase insiden keamanan sistem informasi yang tersolusikan</i>		100%		
	- <i>Jumlah dokumen rencana, program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan</i>		11 Dokumen		
	- <i>Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan</i>		17 Laporan		
	- <i>Jumlah dokumen evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja, serta ketatalaksanaan yang diselesaikan sesuai ketentuan</i>		7 Laporan		
	- <i>Jumlah laporan urusan kepegawaian yang diselesaikan sesuai ketentuan</i>		1 Laporan		

- Jumlah . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Jumlah laporan urusan ketatausahaan, pengelolaan arsip dan dokumentasi serta keprotokolan yang diselesaikan sesuai ketentuan		2 Laporan		
	- Jumlah laporan urusan kerumahtanggaan yang diselesaikan sesuai ketentuan		1 Laporan		
	- Jumlah laporan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa yang diselesaikan sesuai ketentuan		14 Laporan		
Kegiatan 1.1. Penataan kelembagaan, Ketatalaksanaan, serta Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta		934.487	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 1.1.1. Meningkatnya efektivitas organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas kinerja				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- Jumlah rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Sekretaris Negara/telaahan staf di bidang organisasi yang disetujui Deputy Bidang Administrasi Aparatur		3 Dokumen		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
	- Jumlah dokumen analisis jabatan/ analisis beban kerja/ evaluasi jabatan/ standar kompetensi jabatan yang disetujui Deputy Bidang Administrasi Aparatur		1 Dokumen		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
	- Persentase hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori Baik		90%		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
	-Jumlah rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara/dokumen di bidang tata laksana yang disetujui Deputy Bidang Administrasi Aparatur		2 Dokumen		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja

-Jumlah . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Jumlah laporan sosialisasi kebijakan di bidang tata laksana di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang disusun		2 Dokumen		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
	- Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja/ di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)		50%		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
	- Jumlah laporan pengembangan SAKIP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Kantor Staf Presiden yang disusun		2 Dokumen		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
	- Jumlah dokumen PK, dan RA Kemensetneg serta satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Kantor Staf Presiden yang disusun		2 Dokumen		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
	- Jumlah dokumen LKj Kemensetneg, LKj Deputy Bidang Administrasi Aparatur serta laporan hasil koordinasi penyusunan LKj satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Kantor Staf Presiden yang disusun		3 Dokumen		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
	- Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan biro		2 Dokumen		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
Kegiatan 1.2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		Jakarta		2.976.539	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 1.2.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia				

Indikator . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase perencanaan kebutuhan ASN</i>		100%		Biro Sumber Daya Manusia
	- <i>Persentase pelaksanaan pengadaan ASN</i>		100%		Biro Sumber Daya Manusia
	- <i>Persentase pelaksanaan 'pengembangan karir ASN</i>		100%		Biro Sumber Daya Manusia
	- <i>Persentase pelaksanaan promosi dan mutasi ASN</i>		100%		Biro Sumber Daya Manusia
	- <i>Persentase pelaksanaan manajemen kinerja ASN</i>		100%		Biro Sumber Daya Manusia
	- <i>Persentase pelaksanaan penggajian penghargaan dan disiplin ASN</i>		100%		Biro Sumber Daya Manusia
	- <i>Persentase pelaksanaan perlindungan dan pelayanan ASN</i>		100%		Biro Sumber Daya Manusia
	- <i>Persentase pengelolaan Sistem Informasi ASN</i>		100%		Biro Sumber Daya Manusia
	- <i>Persentase pembangunan dan penggunaan Assesment Center ASN</i>		100%		Biro Sumber Daya Manusia
	- <i>Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara</i>		3,6 Skala 5		
Kegiatan 1.3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran		Jakarta		2.202.037	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 1.3.1. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaporan dan evaluasi kegiatan serta dokumen lainnya terkait perencanaan dan penganggaran Kementerian Sekretariat Negara				

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase dokumen perencanaan yang disusun dengan kategori "Baik"</i>		100%		Biro Perencanaan
	- <i>Persentase satuan kerja yang menerapkan penganggaran berbasis kinerja</i>		100%		Biro Perencanaan
	- <i>Persentase dokumen pelaporan dan evaluasi kegiatan yang disusun sesuai dengan standar</i>		100%		Biro Perencanaan
Kegiatan 1.4. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta		325.340.259	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 1.4.1. Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang transparan dan akuntabel				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan sesuai standar</i>		100%		Biro Keuangan
	- <i>Persentase tingkat keandalan laporan keuangan sesuai dengan peraturan</i>		100%		Biro Keuangan
Kegiatan 1.5. Penyelenggaraan Acara/Keprotokolan, Ketatausahaan, dan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta		3.051.300	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Kegiatan 1.5.1. Terselenggaranya pengendalian, pengamanan, pengurusan surat menyurat, naskah dinas, dan dokumen kenegaraan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan dan pengamanan naskah dinas dan dokumen kenegaraan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		3 skala 4		Biro Tata Usaha
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan dan pengamanan arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		3 skala 4		Biro Tata Usaha
	- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		3 skala 4		Biro Tata Usaha
	- Persentase pelayanan acara dan keprotokolan kepada Menteri Sekretaris Negara sesuai dengan jadwal		100%		Biro Tata Usaha
	- Persentase hasil analisis kebijakan kepada Menteri Sekretaris Negara yang diselesaikan tepat waktu		100%		Biro Tata Usaha
Kegiatan 1.6. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta		18.095.219	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 1.6.1. Terselenggaranya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara andal dan aman				

Indikator . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase laporan evaluasi kinerja layanan TIK</i>		100%		
	- <i>Indeks pembuatan/ pengembangan aplikasi sistem informasi</i>		2,80 Skala 4		Biro Infotek
	- <i>Indeks kepuasan layanan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi</i>		2,80 Skala 4		Biro Infotek
	- <i>Indeks ketersediaan layanan infrastruktur komunikasi data dan informasi</i>		2,80 Skala 4		Biro Infotek
Kegiatan 1.7. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum Lainnya Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta		352.079.723	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 1.7.1. Tersedianya sarana dan prasarana kantor, rumah jabatan pejabat negara, wisma, serta pelayanan umum lainnya yang berkualitas				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara</i>		3 skala 4		Biro Umum
	- <i>Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara Tertentu</i>		3 skala 4		Biro Umum
	- <i>Persentase Laporan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) milik Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan ketentuan</i>		100%		Biro Umum

Kegiatan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
Kegiatan 1.8. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PKASN) Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta		10.171.993	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 1.8.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM yang profesional				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- Tersusunnya Road Map Pengembangan Kompetensi ASN (PKASN) Kemensetneg 2020-2024 terintegrasi Human Capital Development Plan (HCDP) Kemensetneg pada bulan Maret Tahun 2020		1 Dokumen		Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	- Tersusunnya annual work plan berdasarkan road map PKASN dengan mempertimbangkan hasil evaluasi program tahun sebelumnya, yang ditetapkan paling lambat pada bulan Januari untuk tiap tahun berjalan		1 Dokumen		Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	- Persentase pegawai yang belum terpenuhi haknya untuk mendapatkan program PKASN sebanyak 20 Jam Pelatihan pada tahun 2020		60%		Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	- Persentase penyelenggaraan program PKASN berbasis e-learning pada tahun 2020		25%		Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	- Tingkat kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai berdasarkan kenaikan angka persentase rata-rata peningkatan kompetensi peserta sebagai dampak mengikuti program PKASN pada tahun 2020		20%		Pusat Pendidikan dan Pelatihan

“Terwujudnya . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<i>"Terwujudnya penyelenggaraan program PKASN yang berkualitas melalui tercapainya target angka indeks kepuasan peserta sebesar minimum 4,20 per tahun pada skala liker 1-5</i>		4,2 Skala 5		Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	<i>- Terwujudnya kontribusi Kemensetneg terhadap program PKASN nasional melalui peningkatan jumlah kegiatan sharing knowledge dan keahlian dengan instansi lainnya</i>		20 Kejiata		Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	<i>Terselenggaranya dukungan program PKASN berkualitas melalui kegiatan ketatausahaan secara efektif yang dilaporkan berkala per semester</i>		2 Laporan		Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kegiatan 1.9. Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta		917.434	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 1.9.1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	<i>- Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti</i>		100%		Inspektorat
	<i>- Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan</i>		100%		Inspektorat
	<i>- Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara</i>		Level 3		Inspektorat
	<i>- Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara</i>		Level 3		Inspektorat

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
Kegiatan 1.10. Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno		Jakarta		250.112.500	UO: Sekretariat Negara Satker: BLU PPKGBK
	Sasaran Kegiatan 1.10.1. Peningkatan Pendapatan Pengelolaan Kawasan				BLU PPKGBK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Pertumbuhan Tingkat Okupansi</i>		3%		
	Sasaran Kegiatan 1.10.2. Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan				BLU PPKGBK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase Persepsi Positif Masyarakat</i>		70%		
	Sasaran Kegiatan 1.10.3. Tercapainya Target PNB				BLU PPKGBK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Realisasi PNB</i>		Rp294,25 Miliar		
	Sasaran Kegiatan 1.10.4. Rasio Keuangan yang Sehat				BLU PPKGBK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional</i>		50%		
	Sasaran Kegiatan 1.10.5 Pengembangan Sistem Informasi BLU				BLU PPKGBK

Indikator . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU</i>		100%		
	Sasaran Kegiatan 1.10.6. Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan				BLU PPKGBK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai ketentuan</i>		80%		
Kegiatan 1.11. Pengelolaan Komplek Kemayoran		Jakarta		127.923.112	UO: Sekretariat Negara Satker: BLU PPKK
	Sasaran Kegiatan 1.11.1 Kerjasama dengan lembaga/badan usaha yang optimal				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase penyelesaian kontrak kerja sama dengan lembaga/badan usaha</i>		100%		
	- <i>Jumlah kontrak kerja sama operasional dengan lembaga/badan usaha</i>		3 Kontrak		
	Sasaran Kegiatan 1.11.2 Pengelolaan kawasan Kemayoran yang modern berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU</i>		100%		

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Kegiatan 1.11.3 Pendapatan layanan yang signifikan				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Realisasi PNBP</i>		Rp159,9 Miliar		
	Sasaran Kegiatan 1.11.4 Pengelolaan keuangan BLU yang sehat				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional</i>		50%		
	Sasaran Kegiatan 1.11.5 Kepuasan masyarakat pengguna layanan yang tinggi				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		Sangat Baik (4,01 Skala 5)		
	Sasaran Kegiatan 1.11.6. Layanan prima masyarakat terkait pemeliharaan dan pengamanan kawasan				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait pemeliharaan dan pengamanan kawasan</i>		100%		
	Sasaran Kegiatan 1.11.7 Inovasi pelayanan berbasis aplikasi				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase layanan yang selesai diproses melalui aplikasi C-Mantap</i>		70%		

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Kegiatan 1.11.8 Peningkatan pengelolaan Badan Layanan Umum yang berkesinambungan				BLU PPKK
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan</i>		85%		
Kegiatan 1.12. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers dan Media kepada Presiden		Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali		451.197.546	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Presiden
	Sasaran Kegiatan 1.12.1. Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden yang berkualitas				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan jamuan, seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan, serta kerumahtanggaan lainnya</i>		4,95 skala 6		Biro Pengelolaan Istana
	- <i>Indeks kepuasan pengguna layanan sarana dan prasarana serta dukungan umum lainnya</i>		4,95 skala 6		Biro Umum
	- <i>Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan pers, media, dan informasi</i>		4,95 skala 6		Biro Pers, Media dan Informasi
	- <i>Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan keprotokolan untuk kegiatan kenegaraan/resmi, tamu negara, dan kegiatan penting lainnya</i>		4,95 skala 6		Biro Protokol



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden		4,95 skala 6		Biro Protokol
	- Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan administrasi dan kerumahtangaan Istana Kepresidenan Bogor		4,95 skala 6		Istana Kepresidenan Bogor
	- Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan administrasi dan kerumahtangaan Istana Kepresidenan Cipanas		4,95 skala 6		Istana Kepresidenan Cipanas
	- Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan administrasi dan kerumahtangaan Istana Kepresidenan Yogyakarta		4,95 skala 6		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	- Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan administrasi dan kerumahtangaan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali		4,95 skala 6		Istana Kepresidenan Tampaksiring
	Sasaran Kegiatan 1.12.2. Terselenggaranya dukungan operasional perkantoran Sekretariat Presiden yang berkualitas				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- Indeks kelancaran dukungan jamuan, seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan, serta kerumahtangaan lainnya		4,95 skala 6		Biro Pengelolaan Istana
	- Jumlah dokumen pengelolaan dana operasional dan bantuan Presiden		2 Dokumen		Biro Pengelolaan Istana
	- Jumlah dokumen pengelolaan dana bantuan masyarakat		2 Dokumen		Biro Pengelolaan Istana
	- Jumlah dokumen penyusunan dana bantuan masyarakat		2 Dokumen		Biro Pengelolaan Istana
	- Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Bogor		100%		Istana Kepresidenan Bogor
	- Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di		100%		Istana Kepresidenan Bogor



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<i>Istana Kepresidenan Bogor</i>				
	<i>- Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Bogor</i>		100%		Istana Kepresidenan Bogor
	<i>- Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor</i>		100%		Istana Kepresidenan Bogor
	<i>- Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Cipanas</i>		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	<i>- Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Cipanas</i>		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	<i>- Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Cipanas</i>		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	<i>- Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas</i>		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	<i>- Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Yogyakarta</i>		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	<i>- Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Yogyakarta</i>		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	<i>- Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Yogyakarta</i>		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	<i>- Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta</i>		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	<i>- Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring
	<i>- Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring
	<i>- Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring
	<i>- Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Kegiatan 1.12.3. Terselenggaranya dukungan manajemen Sekretariat Presiden yang berkualitas				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- Jumlah dokumen penyusunan dana bantuan kemasyarakatan		4,95 skala 6		Biro Umum
	- Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja dan laporan Biro		2 Dokumen		Biro Pengelolaan Istana Biro Umum Biro Pers, Media dan Informasi Biro Protokol
	- Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Bogor		100%		Istana Kepresidenan Bogor
	- Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Bogor		100%		Istana Kepresidenan Bogor
	- Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Bogor		100%		Istana Kepresidenan Bogor
	- Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor		100%		Istana Kepresidenan Bogor
	- Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Cipanas		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	- Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Cipanas		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	- Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Cipanas		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	- Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	- Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Yogyakarta		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	- Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Yogyakarta		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta

-Persentase . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Yogyakarta</i>		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	- <i>Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta</i>		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	- <i>Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring
	- <i>Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring
	- <i>Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring
	- <i>Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring
	Sasaran Kegiatan 1.12.4. Terselenggaranya dukungan sarana dan prasarana Sekretariat Presiden yang berkualitas				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Jumlah dokumen penyusunan dana bantuan kemasyarakatan</i>		4,95 skala 6		Biro Umum
	- <i>Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja dan laporan Biro</i>		2 Dokumen		Biro Umum Biro Pers, Media dan Informasi Biro Protokol
	- <i>Indeks kepuasan pemberian dukungan layanan aplikasi dan jaringan</i>		4,95 skala 6		Biro Pers, Media dan Informasi
	- <i>Persentase pengelolaan Perpustakaan Kepresidenan yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat Presiden</i>		100%		Biro Pers, Media dan Informasi
	- <i>Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Bogor</i>		100%		Istana Kepresidenan Bogor

-Persentase . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Bogor</i>		100%		Istana Kepresidenan Bogor
	- <i>Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Bogor</i>		100%		Istana Kepresidenan Bogor
	- <i>Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor</i>		100%		Istana Kepresidenan Bogor
	- <i>Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Cipanas</i>		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	- <i>Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Cipanas</i>		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	- <i>Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Cipanas</i>		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	- <i>Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas</i>		100%		Istana Kepresidenan Cipanas
	- <i>Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Yogyakarta</i>		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	- <i>Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Yogyakarta</i>		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	- <i>Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Yogyakarta</i>		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	- <i>Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta</i>		100%		Istana Kepresidenan Yogyakarta
	- <i>Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring
	- <i>Persentase dukungan kerumahtangaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring
	- <i>Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring
	- <i>Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali</i>		100%		Istana Kepresidenan Tampaksiring

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
Kegiatan 1.13. Pelaksanaan Dukungan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		Jakarta		1.002.861	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 1.13.1. Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden</i>		90%		
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan</i>		2 Dokumen		
Kegiatan 1.14. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Keprotokolan Wakil Presiden		Jakarta		96.969.256	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 1.14.1. Terlaksananya urusan pemberian dukungan acara dan persidangan, kerumahtanggaan, perjalanan, pengelolaan naskah pidato/notulen dan penterjemahan bagi Wakil Presiden yang berkualitas				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden</i>		4,5 skala 6		

-Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangaan kepada Wakil Presiden		4,5 skala 6		
	- Indeks kelancaran pelaksanaan urusan kerumahtangaan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden		4,5 skala 6		
	- Jumlah rencana kerja dan laporan Biro Protokol		2 Laporan		
Kegiatan 1.15. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Perencanaan Anggaran, Keuangan dan Manajemen Kinerja		Jakarta		7.021.033	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 1.15.1. Layanan perencanaan dan keuangan Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan ketentuan		100%		Biro Protokol
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan		4,5 skala 6		Biro Protokol
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pelaporan akuntansi dan barang milik negara		4,5 skala 6		Biro Protokol
	- Indeks kepuasan pengguna layanan manajemen kinerja		4,5 skala 6		Biro Protokol
	- Persentase pengelolaan Dana Operasional Wakil Presiden sesuai dengan standar		100%		Biro Protokol
	- Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan		100%		Biro Protokol
	- Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor		100%		Biro Protokol

Kegiatan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
Kegiatan 1.16. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Tata Usaha, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Kepegawaian		Jakarta		1.678.734	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 1.16.1. Terlaksananya urusan ketatausahaan, pengelolaan teknologi informasi, dan kepegawaian, pengoordinasian evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan kesehatan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Indeks kepuasan layanan ketatausahaan</i>		4,5 skala 6		Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian
	- <i>Indeks kepuasan pengelolaan teknologi informasi</i>		4,5 skala 6		Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian
	- <i>Indeks kepuasan pengelolaan kepegawaian</i>		4,5 skala 6		Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian
	- <i>Indeks kepuasan layanan kesehatan</i>		4,5 skala 6		Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian
	- <i>Jumlah laporan analisis, evaluasi, penyusunan, dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan</i>		1 Laporan		Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian
	- <i>Jumlah rencana kerja Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian</i>		2 Laporan		Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian
	- <i>Jumlah laporan Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian</i>		1 Laporan		Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian
	- <i>Pengembangan kompetensi diri</i>		20 Jam Pelajaran		Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian

-Jumlah . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 101 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi di unit kerja sesuai arahan pimpinan		1 Laporan		Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian
	- Jumlah kegiatan pembinaan pejabat fungsional		1 Laporan		Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian
Kegiatan 1.17. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Sekretariat Wakil Presiden		Jakarta		37.991.877	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 1.17.1. Tersedianya sarana dan prasarana Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- Indeks kepuasan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan		4,5 skala 6		Biro Umum
	- Indeks kepuasan ketersediaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan		4,5 skala 6		Biro Umum
	- Indeks kepuasan ketersediaan sarana dan prasarana kendaraan		4,5 skala 6		Biro Umum
	- Indeks kepuasan penyelenggaraan ketertiban keamanan dalam		4,5 skala 6		Biro Umum
	- Indeks kepuasan pengelolaan perpustakaan		4,5 skala 6		Biro Umum
	- Jumlah rencana kerja dan laporan yang disusun Biro Umum		2 Laporan		Biro Umum
Kegiatan 1.18. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Militer Presiden		Jakarta		6.341.240	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Militer Presiden

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Kegiatan 1.18.1. Terwujudnya dukungan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Militer Presiden yang optimal				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	-Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan		3,9 skala 5		Biro Umum
	- Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan		3,9 skala 5		Biro Umum
	- Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi kepegawaian		3,9 skala 5		Biro Umum
	- Indeks kepuasan pengguna layanan ketatausahaan dan perlengkapan		3,9 skala 5		Biro Umum
Kegiatan 1.19. Dukungan Pengamanan Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Pemerintah		Jakarta		75.719.012	UO/Satker Pasukan Pengamanan Presiden
	Sasaran Kegiatan 1.19.1. Dukungan Pengamanan Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarganya serta tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintah				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- Persentase kekuatan personel, jumlah kegiatan dan dukungan dalam pelaksanaan pengamanan terhadap Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarga serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintah		100%		

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
Kegiatan 1.20. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi		Jakarta		3.106.163	UO/Satker Dewan Pertimbangan Presiden
	Sasaran Kegiatan 1.20.1. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden</i>		100%		
	- <i>Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden</i>		100%		
	- <i>Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu</i>		2 Dokumen		
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Biro Data dan Informasi yang disusun</i>		2 Dokumen		
Kegiatan 1.21. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden		Jakarta		29.744.707	UO/Satker Dewan Pertimbangan Presiden
	Sasaran Kegiatan 1.21.1. Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan</i>		100%		

-Persentase . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan</i>		100%		
	- <i>Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan</i>		2 Dokumen		
	- <i>Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan</i>		10 Dokumen		
	- <i>Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar</i>		1 Dokumen		
	- <i>Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan</i>		9 Dokumen		
	- <i>Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan</i>		1 Dokumen		
	- <i>Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan</i>		100%		
	- <i>Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa</i>		100%		
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun</i>		2 Dokumen		
Kegiatan 1.22. Pemberian Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK		Jakarta		54.558.755	UO/Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
	Sasaran Kegiatan 1.22.1. Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban dan Dukungan Kelembagaan di Lingkungan LPSK				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase Pemberian Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban yang Sesuai Ketentuan</i>		100%		

-Persentase . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase Dukungan Kelembagaan Terhadap Pemberian Perlindungan Saksi dan/ atau Korban</i>		100%		
	- <i>Persentase Sarana dan Prasarana yang Mencukupi Dalam Mendukung Kegiatan Perlindungan Saksi dan/ atau Korban</i>		100%		
Kegiatan 1.23.Pemberian Dukungan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Melaksanakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional, Komunikasi Politik, dan Pengelolaan Isu Strategis		Jakarta		76.584.364	UO/Satker Kantor Staf Presiden
	Sasaran Kegiatan 1.23.1. Terselenggaranya pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pogram-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengendalian isu strategis				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan pimpinan Kantor Staf Presiden</i>		100%		
	- <i>Persentase ketersediaan up time sistem dan aplikasi kritikal bagi Kantor Staf Presiden</i>		100%		
	<i>Persentase insiden keamanan sistem informasi yang tersolusikan</i>		100%		
	- <i>Jumlah dokumen rencana, program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan</i>		11 Dokumen		
	- <i>Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan</i>		17 Laporan		
	- <i>Jumlah dokumen evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja, serta ketatalaksanaan yang diselesaikan sesuai ketentuan</i>		7 Laporan		

-Jumlah . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Jumlah laporan urusan kepegawaian yang diselesaikan sesuai ketentuan		1 Laporan		
	- Jumlah laporan urusan ketatausahaan, pengelolaan arsip dan dokumentasi serta keprotokolan yang diselesaikan sesuai ketentuan		2 Laporan		
	- Jumlah laporan urusan kerumahtanggaan yang diselesaikan sesuai ketentuan		1 Laporan		
	- Jumlah laporan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa yang diselesaikan sesuai ketentuan		14 Laporan		
Program 06 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden				86.372.462	- UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden - UO/Satker Paspampres - UO/Satker Dewan Pertimbangan Presiden - UO/Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban - UO/Satker Kantor Staf Presiden
	Sasaran Program 6.1. Terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan kewarganegaraan yang berkualitas				Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara</i>		100%		
	- <i>Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan kewarganegaraan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara</i>		100%		
	- <i>Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</i>		100%		
	Sasaran Program 6.2. Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik serta terselenggaranya hubungan masyarakat				Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta hubungan masyarakat</i>		100%		

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Program 6.3 Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara				Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara</i>		45%		
	Sasaran Program 6.4. Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara				Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat, dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara</i>		3,9 Skala 5		
	Sasaran Program 6.5. Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kualitas pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri				Sekretariat Kementerian
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara</i>		3 Skala 5		

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Program 6.6. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya				Deputi Bidang Administrasi Aparatur
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase rancangan keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara</i>		100%		
	- <i>Indeks kepuasan Panitia Seleksi terhadap penyelenggaraan seleksi calon pejabat negara dan pejabat lainnya oleh Sekretariat Panitia Seleksi</i>		3,0 skala 5		
	- <i>Persentase rancangan keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan/ atau pemberhentian Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya, serta Rancangan Keputusan Presiden mengenai kenaikan pangkat dan pemberhentian PNS yang wewenang penetapannya berada atau memerlukan persetujuan Presiden yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara</i>		100%		
	Sasaran Program 6.7. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden				Sekretariat Wakil Presiden
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	- <i>Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden</i>		90%		

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Program 6.8. Terselenggaranya dukungan administrasi personel TNI dan Polri yang berkualitas				Sekretariat Militer Presiden
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	<i>- Persentase pelayanan administrasi personel TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden</i>		100%		
	Sasaran Program 6.9. Terselenggaranya dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berkualitas				Sekretariat Militer Presiden
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	<i>- Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden</i>		100%		
	Sasaran Program 6.10. Meningkatnya kelancaran aktivitas Presiden dan Wakil Presiden melalui dukungan koordinasi pengamanan				Sekretariat Militer Presiden
	<i>Indikator Kinerja Program</i>				
	<i>- Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman</i>		100%		
Kegiatan 6.1. Pelaksanaan analisis dan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang perekonomian		Jakarta		128.091	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara/Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Kegiatan 6.1.1. Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang <u>perekonomian yang berkualitas</u>				Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</i>		100%		
	- <i>Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</i>		100%		
Kegiatan 6.2. Pelaksanaan analisis dan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan		Jakarta		279.245	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara/Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum
	Sasaran Kegiatan 6.2.1. Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas				Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</i>		100%		

-Persentase . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</i>		100%		
Kegiatan 6.3. Pelaksanaan analisis dan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah		Jakarta		114.202	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara/Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum
	Sasaran Kegiatan 6.3.1. Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang berkualitas				Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</i>		100%		
	- <i>Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</i>		100%		
Kegiatan 6.4. Analisis penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berkualitas		Jakarta		201.812	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara/ Deputi Bidang Perundang- Undangan dan Administrasi Hukum

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Kegiatan 6.4.1. Analisis penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berkualitas				Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</i>		100%		
	- <i>Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</i>		100%		
Kegiatan 6.5.Pelaksanaan analisis dan administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Kewarganegaraan, serta Pengadministrasian Peraturan		Jakarta		655.360	UO: Sekretariat Negara/Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara/Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum
	Sasaran Kegiatan 6.5.1. Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnsetsi, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan kewarganegaraan yang berkualitas				Asisten Deputi Bidang Administrasi Hukum, Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum

Indikator . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</i>		100%		
	- <i>Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, eksradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</i>		100%		
	- <i>Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</i>		100%		
	- <i>Persentase rancangan keputusan presiden dan surat kuasa khusus presiden yang akan ditetapkan/ ditandatangani oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</i>		100%		
Kegiatan 6.6. Pelaksanaan Hubungan dengan Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Daerah		Jakarta		748.132	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara/Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
	Sasaran Kegiatan 6.6.1. Terselenggaranya hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan Lembaga Negara dan Daerah				Asisten Deputi Bidang Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- Jumlah laporan hasil koordinasi dan/ atau pemantauan kegiatan-kegiatan Lembaga Non Struktural, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kementerian dan Lembaga Daerah kepada Deputi Hublemmas/ Mensesneg/ Presiden		100%		
	- Jumlah laporan hasil koordinasi dan/ atau pelaksanaan kunjungan kerja dengan Lembaga Negara kepada Deputi Hublemmas/ Mensesneg/ Presiden		100%		
	- Jumlah laporan hasil penyelenggaraan kegiatan-kegiatan koordinasi dalam rangka Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Koordinasi		100%		
	- Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi dukungan penyelenggaraan hubungan kelembagaan		100%		
	- Jumlah laporan hasil penyelenggaraan kegiatan-kegiatan koordinasi terkait dinamika Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Kementerian kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan		100%		
	- Persentase penanganan memorandum dan surat saran dan masukan terhadap permohonan serta aspirasi dari Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Kementerian yang dilaporkan/ disampaikan kepada Presiden dan/ atau Menteri Sekretaris Negara sesuai dengan standar		100%		

-Persentase . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase penanganan memorandum dan surat berkitan dengan dinamika dan aspirasi dari Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Kementerian yang ditindaklanjuti kepada instansi terkait dan/ atau diselesaikan secara internal pada Deputi/ Sisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah sesuai dengan standar</i>		100%		
	- <i>Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, pidato kenegaraan di depan Rapat Paripurna DPR RI mengenai RAPBN dan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI</i>		100%		
	- <i>Persentase laporan hasil koordinasi acara Konsultasi Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat antara Presiden/ Mensesneg dengan Lembaga Negara (DPR RI)</i>		100%		
	- <i>Persentase laporan hasil pengarahan penyusunan dokumentasi acara konsultasi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat antara Presiden/ Mensesneg dengan Lembaga Negara (DPR RI)</i>		100%		
Kegiatan 6.7. Pelaksanaan Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik		Jakarta		763.741	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara/Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Kegiatan 6.7.1. Terselenggaranya hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik				Asisten Deputi Bidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase dukungan administrasi dan analisis dalam rangka penyelenggaraan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik sesuai dengan standar</i>		100%		
Kegiatan 6.8. Penanganan Pengaduan Masyarakat		Jakarta		896.008	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara/Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
	Sasaran Kegiatan 6.8.1. Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara				Asisten Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara</i>		45%		
	- <i>Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat</i>		32 Laporan		
	- <i>Jumlah laporan koordinasi dalam rangka optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat</i>		5 Laporan		

-Jumlah . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 118 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Jumlah laporan bulanan dan tahunan penanganan pengaduan masyarakat		13 Laporan (12 bulanan, 1 tahunan)		
	- Jumlah publikasi penanganan pengaduan masyarakat		3 Buletin		
	- Jumlah laporan pengarsipan pengaduan masyarakat		1 Laporan		
	- Jumlah laporan penguatan focal point dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota		3 Laporan		
	- Jumlah laporan forum koordinasi penanganan pengaduan masyarakat		5 Laporan		
Kegiatan 6.9. Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta		819.302	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 6.9.1. Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar				
	Indikator Kinerja Kegiatan		100%		
	- Persentase pelayanan informasi publik sesuai dengan standar		100%		Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat
	- Persentase hasil monitoring dan analisis media sesuai dengan standar		100%		
	- Persentase kegiatan peliputan dan dokumentasi Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar		100%		
	- Persentase diseminasi informasi sesuai dengan standar		100%		

-Persentase . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase penanganan surat terkait permohonan kepada Presiden/ dan atau Menteri Sekretaris Negara mengenai kegiatan kehumasan sesuai standar</i>		100%		
	- <i>Persentase kegiatan komunikasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan</i>		100%		
	- <i>Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/ atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara</i>		100%		
Kegiatan 6.10. Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri		Jakarta		3.258.290	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 6.10.1.Terwujudnya koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri yang cepat dan tepat				Biro Kerja Sama Teknik Luar Negari
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%		
	- <i>Persentase dokumen kerja sama teknik meliputi proyek, tenaga ahli, dan beasiswa yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%		
	- <i>Persentase dokumen rekomendasi fasilitas kerja sama teknik, meliputi keimigrasian, perpajakan, kepabeanan, dan kendaraan yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%		
	- <i>Persentase pelaksanaan Program Kerjasama Teknik Selatan-Selatan (KTSS) Indonesia</i>		100%		

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
Kegiatan 6.11. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara serta Administrasi Lainnya yang berkaitan dengan Pejabat Negara		Jakarta		336.599	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 6.11.1. Meningkatnya kualitas penanganan administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya				Deputi Bidang Administrasi Aparatur
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- <i>Persentase rancangan keputusan presiden mengenai pengangkatan pemberhentian dan pensiun pejabat negara, dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%		Biro Administrasi Pejabat Negara
	- <i>Persentase rancangan surat presiden, surat mensesneg, dan surat deputi bidang administrasi aparatur terkait pejabat negara, dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%		Biro Administrasi Pejabat Negara
	- <i>Persentase salinan dan petikan keputusan presiden mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara, dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%		Biro Administrasi Pejabat Negara
	- <i>Persentase naskah pelantikan pejabat negara dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%		Biro Administrasi Pejabat Negara
	- <i>Persentase profuk administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya yang ditatayusahakan, dikelola datanya serta diarsipkan dan didokumentasikan sesuai standar</i>		100%		Biro Administrasi Pejabat Negara
	- <i>Indeks kepuasan panitia seleksi terhadap penyelenggaraan seleksi calon pejabat negara dan pejabat lainnya ole Sekretariat Panitia Seleksi</i>		3 Skala 5		Biro Administrasi Pejabat Negara

Kegiatan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
Kegiatan 6.12.1. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Pemerintahan serta Administrasi Lainnya yang berkaitan dengan Pejabat Pemerintahan		Jakarta		330.213	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Sasaran Kegiatan 6.12.1. Meningkatnya kualitas administrasi pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya				Deputi Bidang Administrasi Aparatur
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	<i>- Persentase rancangan keputusan presiden mengenai pengangkatan pemberhentian dan pensiun pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya, serta rancangan keputusan presiden mengenai kenaikan pangkat dan pemberhentian PNS yang wewenang penetapannya berada atau memerlukan persetujuan presiden yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%		Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan
	<i>- Persentase petikan dan salinan keputusan presiden tentang pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya, kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%		Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan
	<i>- Persentase penyiapan bahan analisis dan penyusunan pendapat terkait pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya, kenaikan pangkat pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional jenjang utama yang ditindaklanjuti</i>		100%		Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan

-Persentase . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase pengadministrasian keputusan presiden tetnang pejabat pemerintahan dan pejabat lainnyam serta kenaikan pangkat, pmeberhentuan, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional jenjang utama yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%		Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan
Kegiatan 6.13. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia		Jakarta		158.883	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 6.13.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan</i>		90%		Asisten Deputy Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputy Pembangunan Sumber Daya Manusia</i>		2 Dokumen		Asisten Deputy Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
	- <i>Persentase laporan kegiatan lain sesuai arahan pimpinan dalam memberikan dukungan pelaksanaan Program percepatan Pencegahan Anak Kerdil (P2AK) pada DLI 2,3,4,6,7</i>		90%		Asisten Deputy Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kegiatan 6.14. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jakarta		168.471	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Kegiatan 6.14.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan</i>		90%		Asisten Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>		2 Dokumen		Asisten Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan 6.15. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri		Jakarta		154.935	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 6.15.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang Hubungan Luar Negeri				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase hasil analisis kebijakan di bidang Hubungan Luar Negeri</i>		100%		Asisten Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Bidang Hubungan Luar Negeri</i>		2 Dokumen		Asisten Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri
Kegiatan 6.16. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan		Jakarta		153.572	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Sasaran Kegiatan 6.16.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan</i>		90%		Asisten Deputi Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Asisten Deputi</i>		2 Dokumen		Asisten Deputi Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan
	- <i>Persentase laporan hasil kegiatan lain sesuai tugas dan fungsi di unit kerja sesuai arahan pimpinan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting (DLI 1,5,8,9, dan 10)</i>		90%		Asisten Deputi Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan
Kegiatan 6.17. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Publik		Jakarta		168.577	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 6.17.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan</i>		100%		Asisten Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

-Persentase . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- <i>Persentase dukungan pelayanan kepada wartawan media massa, terkait dukungan logistik dan peliputan kegiatan Wakil Presiden dan/ atau Istri/Suami Wakil Presiden yang disusun</i>		100%		Asisten Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
	- <i>Persentase dukungan diseminasi informasi kegiatan Wakil Presiden dan/ atau Istri/Suami Wakil Presiden dan kegiatan kesekretariatan melalui media Setwapres yang diselesaikan</i>		100%		Asisten Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
	- <i>Persentase dukungan peliputan dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan kegiatan kesekretariatan yang disusun</i>		100%		Asisten Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisen Deputi</i>		2 Dokumen		Asisten Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
Kegiatan 6.18 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang		Jakarta		241.814	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 6.18.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan</i>		90%		Asisten Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>		2 Dokumen		Asisten Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kegiatan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
Kegiatan 6.19 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		Jakarta		186.522	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 6.19.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan</i>		90%		Asisten Deputy Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik</i>		2 Dokumen		Asisten Deputy Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Kegiatan 6.20 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		Jakarta		162.210	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 6.20.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan</i>		100%		Asisten Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan bidang politik, hukum, dan keamanan</i>		2 Dokumen		Asisten Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
Kegiatan 6.21 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana		Jakarta		50.938.895	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 6.21.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan</i>		90%		Asisten Deputy Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputy Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana</i>		2 Dokumen		Asisten Deputy Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana
Kegiatan 6.22 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati		Jakarta		198.562	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 6.22.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati oleh Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi Infrastruktur dan Kemaritiman</i>		100%		Asisten Deputy Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputy Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati</i>		2 Dokumen		Asisten Deputy Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati

Kegiatan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
Kegiatan 6.23 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha		Jakarta		207.075	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 6.23.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman</i>		100%		Asisten Deputi Bidang Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha
	- <i>Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi Bidang Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha</i>		2 Dokumen		Asisten Deputi Bidang Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha
Kegiatan 6.24 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif		Jakarta		223.977	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Wakil Presiden
	Sasaran Kegiatan 6.24.1. Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif				
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	- <i>Persentase hasil analisis kebijakan di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman</i>		100%		Asisten Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

-Jumlah . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi Bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif		2 Dokumen		Asisten Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kegiatan 2.22. Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan Administrasi Personel TNI dan Polri		Jakarta		1.760.000	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Militer Presiden
	Sasaran Kegiatan 2.22.1. Terwujudnya dukungan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang tepat dan akurat				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- Persentase rancangan naskah keputusan presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang diselesaikan sesuai standar		100%		Biro Personel TNI dan Polri
	- Persentase penyelesaian rancangan naskah keputusan presiden (Keppres) tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang wewenang penetapannya berada pada Presiden sesuai standar pelayanan				Biro Personel TNI dan Polri
	- Persentase layanan penyelenggaraan upacara kenegaraan dan pelantikan TNI dan Polri dengan Inspektur Upacara Presiden/ Wakil Presiden yang dilaksanakan sesuai rencana		100%		Biro Personel TNI dan Polri
	- Persentase layanan pembinaan personel TNI dan Polri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sesuai standar pelayanan		100%		Biro Personel TNI dan Polri
Kegiatan 2.23. Penyelenggaraan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan		Jakarta		20.378.844	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Militer Presiden
	Sasaran Kegiatan 2.23.1.				

Sasaran. . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (*dalam ribuan)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Terwujudnya dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diselesaikan sesuai standar				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	-Persentase rancangan naskah keputusan presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diselesaikan sesuai standar		100%		Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
	- Persentase kelengkapan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang didistribusikan		100%		Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
	- Persentase penyelesaian rancangan keppres tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sesuai standar pelayanan		100%		Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
	- Persentase layanan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan		100%		Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Kegiatan 2.24. Pengoordinasian Pengamanan Fisik dan Non Fisik bagi VVIP		Jakarta		2.739.130	UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Militer Presiden
	Sasaran Kegiatan 2.24.1. Terwujudnya koordinasi pengamanan yang efektif				
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>				
	- Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Pengamanan Fisik dan Non Fisik VVIP yang dilaksanakan sesuai Standar		100%		Biro Pengamanan
	- Persentase layanan pengamanan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan negara asing (VVIP) sesuai standar pelayanan		100%		Biro Pengamanan

B. Tahun 2021 s.d. 2024

B. Tahun . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden		100%	100%	100%	100%					
	- Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi		100%	100%	100%	100%					

perubahan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional</i>										
	2. Sasaran Strategis Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden										UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Wakil Presiden

dan/atau . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis										
	- Indeks Kualitas Analisis Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden		2,72 Skala 4	2,84 Skala 4	2,95 Skala 4	3,03 Skala 4					
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden		3,04 Skala 4	3,28 Skala 4	3,42 Skala 4	3,58 Skala 4					

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 135 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti		46%	47%	48%	50%					
	3. Sasaran Strategis Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif										UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis										
	- Indeks efektivitas program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular		3,1 Skala 5	3,2 Skala 5	3,3 Skala 5	3,4 Skala 5					
	- Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri		3,1 Skala 5	3,2 Skala 5	3,3 Skala 5	3,4 Skala 5					
	- Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri		3,58 Skala 5	3,6 Skala 5	3,62 Skala 5	3,64 Skala 5					

4. Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	4. Sasaran Strategis Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas										UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Militer Presiden
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis										
	- Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri		2,83 Skala 4	2,91 Skala 4	3,00 Skala 4	3,09 Skala 4					

-Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 138 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan		2,92 Skala 4	2,96 Skala 4	3,00 Skala 4	3,04 Skala 4					
	5. Sasaran Strategis Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data,										UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden

dan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 139 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan										
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis										
	- Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden		4,78 Skala 6	4,83 Skala 6 4,83 Skala 6	4,83 Skala 6	4,88 Skala 6					



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden		4,68 Skala 6	4,73 Skala 6	4,73 Skala 6	4,78 Skala 6					
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden		4,58 Skala 6	4,63 Skala 6	4,63 Skala 6	4,68 Skala 6					

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 141 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden		4,25 Skala 6	4,27 Skala 6	4,3 Skala 6	4,32 Skala 6					
	6. Sasaran Strategis Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi										- UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 142 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis										
	- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara		65,63	65,69	65,75	65,81					
	- Indeks Sistem Merit		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik					
	- Indeks Profesionalitas ASN		64	68	72	76					
	- Hasil Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		P4 dari P5 (65)	P4 dari P5 (70)	P4 dari P5 (75)	P4 dari P5 (79)					

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 143 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks Maturitas SPBE		Baik	Baik	Baik	Baik					
	7. Sasaran Strategis Pengendalian internal yang efektif										- UO: Sekretariat Negara Satker: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis										
	- Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Sekretariat Negara		3,17 (Level 3)	3,22 (Level 3)	3,27 (Level 3)	3,32 (Level 3)					

8. Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	8. Sasaran Strategis Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel										- UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Presiden 3. Sekretariat Wakil Presiden 4. Sekretariat Militer Presiden
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis										
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja		76,04 (BB)	76,08 (BB)	76,12 (BB)	76,16 (BB)					



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara		WTP	WTP	WTP	WTP					

9. Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	9. Sasaran Strategis Pelaksanaan tugas khusus yang optimal										- UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Satker BLU PPKGBK 2. Satker BLU PPKK - UO/Satker Paspampres - UO/Satker Dewan Pertimbangan Presiden - UO/Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban - UO/Satker Kantor Staf Presiden

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis										
	- <i>Persentase capaian kinerja tugas khusus</i>		100%	100%	100%	100%					



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program 1 Program Dukungan Manajemen							1.203.370.625	1.523.269.616	1.655.189.032	1.816.662.391	- UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. PPKGBK 3. PPKK 4. Sekretariat Presiden 5. Sekretariat Wakil Presiden 6. Sekretariat Militer Presiden 7. Paspampres 8. Dewan Pertimbangan Presiden 9. Kantor Staf Presiden Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 1.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- <i>Indeks Sistem Merit</i>		Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik					
	- <i>Indeks Profesionalitas ASN</i>		64	68	72	76					
	- <i>Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat</i>		2,76 skala 4	2,77 skala 4	2,78 skala 4	2,79 skala 4					



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Negara</i>										
	<i>- Persentase pegawai yang terpenuhi haknya untuk mendapatkan program PKASN minimal 20 JP per tahun</i>		55%	65%	75%	85%					
	<i>Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian Sekretariat Presiden</i>		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					
	<i>Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi kepegawaian</i>		3,07 skala 4	3,13 skala 4	3,13 skala 4	3,2 skala 4					

Sekretariat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Sekretariat Wakil Presiden</i>										
	<i>Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi kepegawaian Sekretariat Militer Presiden</i>		3,13 skala 4	3,14 skala 4	3,15 skala 4	3,16 skala 4					
	Sasaran Program 1.2. Organisasi, tata kelola, dan transformasi birokrasi yang efektif										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	<i>- Indeks Reformasi Birokrasi</i>		65,63	65,69	65,75	65,81					

Kementerian . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Kementerian Sekretariat Negara</i>										
	<i>- Hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara</i>		P4 dari P5 (65)	P4 dari P5 (70)	P4 dari P5 (75)	P4 dari P5 (79)					
	<i>- Tingkat Kematangan Kebijakan Internal SPBE</i>		Baik (3,10)	Baik (3,20)	Baik (3,30)	Baik (3,40)					
	<i>- Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE</i>		3,1	3,2	3,3	3,4					
	<i>- Tingkat Kematangan BDA</i>		pre-adoption	pre-adoption	early adoption	early adoption					

-Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan layanan IT Sekretariat Kementerian		2,8 skala 4	2,85 skala 4	2,9 skala 4	2,95 skala 4					
	- Indeks kepuasan layanan naskah dinas		3,4 skala 4	3,5 skala 4	3,5 skala 4	3,5 skala 4					
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan dan pengamanan arsip Kementerian Sekretariat Negara		3,1 skala 4	3,2 skala 4	3,3 skala 4	3,4 skala 4					
	- Indeks pelayanan informasi publik pada		4,0 skala 6	4,05 skala 6	4,1 skala 6	4,15 skala 6					

penerimaan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara</i>										
	<i>- Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara</i>		100%	100%	100%	100%					



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Sekretariat Kementerian		3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4					
	- Indeks kepuasan layanan kesehatan		3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4					
	Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan organisasi, tata kelola, dan transformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					

Presiden . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Presiden</i>										
	<i>Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan organisasi, tata kelola, dan transformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden</i>		3,07 skala 4	3,13 skala 4	3,13 skala 4	3,2 skala 4					
	<i>Indeks kepuasan pengguna layanan ketatausahaan Sekretariat Militer Presiden</i>		3,13 skala 4	3,14 skala 4	3,15 skala 4	3,16 skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 157 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 1.3. Pengawasan yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Sekretariat Negara		3,17 (Level 3)	3,22 (Level 3)	3,27 (Level 3)	3,32 (Level 3)					
	Sasaran Program 1.4. Perencanaan kinerja dan anggaran, serta pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan akuntabel										

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	<i>- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara</i>		76,04 (BB)	76,08 (BB)	76,12 (BB)	76,16 (BB)					
	<i>- Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sekretariat Negara</i>		92,9	93,6	94,3	95					
	<i>- Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara</i>		WTP	WTP	WTP	WTP					

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan manajemen layanan keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara		3,3 skala 4	3,4 skala 4	3,5 skala 4	3,6 skala 4					
	- Indeks kepuasan pengguna layanan perencanaan kinerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran Sekretariat Presiden		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan pengguna layanan perencanaan dan keuangan Sekretariat Wakil Presiden		3,07 skala 4	3,13 skala 4	3,13 skala 4	3,2 skala 4					
	- Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan dan perencanaan Sekretariat Militer Presiden		3,13 skala 4	3,14 skala 4	3,15 skala 4	3,16 skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 1.5. Layanan BLU Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- Indeks kepuasan pengguna layanan kawasan PPK Gelora Bung Karno		4 skala 4	4 skala 4	4 skala 4	4 skala 4					
	- Indeks kepuasan pengguna layanan kawasan PPK Kemayoran		4 skala 4	4 skala 4	4 skala 4	4 skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 1.6. Terwujudnya dukungan administrasi yang baik pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- Persentase Terpenuhinya Dukungan Internal untuk		100%	100%	100%	100%					

Mendukung . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Mendukung Operasional Paspampres										
	- Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden		86%	88%	91%	95%					



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan layanan teknis dan administrasi yang diberikan oleh Sekretariat Kantor Staf Presiden		3,7 skala 5	3,8 skala 5	3,9 skala 5	4 skala 5					
Kegiatan 1.1.	Penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PKASN) Kementerian Sekretariat Negara	Jakarta					10.955.963	17.032.951	18.972.488	21.141.415	
	Sasaran Kegiatan 1.1.1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia										

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	<i>Persentase perencanaan kebutuhan ASN</i>		100%	100%	100%	100%					
	<i>Persentase pelaksanaan pengadaan ASN</i>		100%	100%	100%	100%					
	<i>Persentase pelaksanaan pengembangan karier ASN</i>		100%	100%	100%	100%					
	<i>Persentase pelaksanaan promosi dan mutasi ASN</i>		100%	100%	100%	100%					
	<i>Persentase pelaksanaan manajemen kinerja ASN</i>		100%	100%	100%	100%					

Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Persentase pelaksanaan manajemen penggajian, penghargaan, dan disiplin ASN</i>		100%	100%	100%	100%					
	<i>Persentase pelaksanaan perlindungan dan pelayanan ASN</i>		100%	100%	100%	100%					
	<i>Persentase pengelolaan sistem informasi ASN</i>		100%	100%	100%	100%					
	<i>Persentase pembangunan dan penggunaan Assessment Center</i>		100%	100%	100%	100%					



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara</i>		2,76 skala 4	2,77 skala 4	2,78 skala 4	2,79 skala 4					
	<i>Indeks Profesionalitas ASN</i>		64	68	72	76					
	Sasaran Kegiatan 1.1.2. Pengembangan Kompetensi ASN (PKASN) yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	<i>Persentase perencanaan</i>		60%	65%	70%	75%					

program . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>program PKASN yang berkualitas</i>										
	<i>Persentase pegawai yang terpenuhi haknya untuk mendapatkan program PKASN minimal 20 JP per tahun</i>		55%	65%	75%	85%					
	<i>Persentase terwujudnya pengembangan substansi sistem tata kelola PKASN terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi</i>		45%	50%	55%	60%					

Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Persentase penyelenggaraan program PKASN berbasis e-learning</i>		35%	40%	45%	50%					
	<i>Persentase rata-rata peningkatan kompetensi peserta program PKASN</i>		22%	24%	26%	28%					
	<i>Indeks kepuasan peserta program PKASN (pengajar, materi, sarpras, penyelenggara)</i>		4,20 skala 5	4,20 skala 5	4,20 skala 5	4,20 skala 5					
	<i>Indeks kepuasan pengguna layanan</i>		3,2 skala 4	3,2 skala 4	3,2 skala 4	3,2 skala 4					



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>kepastakawanan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara</i>										
Kegiatan 1.2. Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan, Hukum, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta					1.375.012	2.005.111	2.105.367	2.210.635	
	Sasaran Kegiatan 1.2.1. Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara yang efektif										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										

Jumlah . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 171 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Jumlah satuan organisasi/unit kerja/unit organisasi yang memiliki skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan "efektif"</i>		3 satuan organisasi/ unit kerja/ unit organisasi	5 satuan organisasi/ unit kerja/ unit organisasi	7 satuan organisasi/ unit kerja/ unit organisasi	9 satuan organisasi/ unit kerja/ unit organisasi					
	<i>Jumlah dokumen analisis jabatan/analisis beban kerja/evaluasi jabatan/standar kompetensi jabatan yang disetujui Deputy Bidang Administrasi Aparatur</i>		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 1.2.2. Tata laksana yang efektif										
	Indikator Kinerja Kegiatan										
	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal SPBE		Baik (3,10)	Baik (3,20)	Baik (3,30)	Baik (3,40)					
	Indeks efektivitas kebijakan tata laksana di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		4,1 dalam skala 5	4,15 dalam skala 5	4,20 dalam skala 5	4,25 dalam skala 5					
	Jumlah peta resiko di lingkungan Kementerian		12 peta resiko	24 peta resiko	36 peta resiko	48 peta resiko					

Sekretariat . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Sekretariat Negara yang sesuai standar</i>										
	<i>Jumlah inovasi Kemensetneg yang mengikuti lomba inovasi</i>		5 inovasi	5 inovasi	5 inovasi	5 inovasi					
	<i>Jumlah Rpermensesneg yang telah disetujui oleh Deputi Bidang Admnistrasi Aparatur</i>		2 Permen sesneg	2 Permen sesneg	2 Permen sesneg	2 Permen sesneg					
	Sasaran Kegiatan 1.2.3. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										

Indikator. . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 174 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Persentase Sator/Satker yang memiliki indeks RB yang "Baik"</i>		50%	55%	60%	65%					
	<i>Jumlah Unit Kerja yang diusulkan Berpredikat ZI WBK dan/atau WBBM</i>		2 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja	4 unit kerja					
	Sasaran Kegiatan 1.2.4. Advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat negara yang efektif										

Negara . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	<i>Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait advokasi hukum dan litigasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur</i>		100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 1.3. Penyelenggaraan Dukungan Sarana, Prasarana, Pelayanan Umum Lainnya, serta Pengelolaan TIK di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta					185.747.720	256.331.853	307.598.224	369.117.869	

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 176 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 1.3.1 Tata Kelola SPBE dan Layanan TIK yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- <i>Tingkat Kematangan BDA</i>		pre- adoptio n	pre- adoptio n	early adoptio n	early adoptio n					
	- <i>Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE</i>		3,1	3,2	3,3	3,4					
	- <i>Persentase penyelesaian aplikasi</i>		100%	100%	100%	100%					
	- <i>Tingkat efektivitas pembuatan/ pengembangan aplikasi</i>		70	71	72	73					<i>Persentase . . .</i>



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Tingkat downtime sistem TIK		1%	1%	1%	1%					
	- Indeks kepuasan pengguna layanan IT internal		2,8	2,85	2,9	2,95					
	Sasaran Kegiatan 1.3.2 Layanan Sarana dan Prasarana serta Kesehatan yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										
	- Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana		3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4					Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 178 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Kementerian Sekretariat Negara</i>										
	<i>- Indeks kepuasan layanan kesehatan</i>		3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4					
	Sasaran Kegiatan 1.3.3 Pengelolaan BMN dan pengadaan barang/jasa yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase Laporan pengelolaan BMN milik Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan ketentuan		100%	100%	100%	100%					
	- Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		3 skala 5	3 skala 5	3 skala 5	3 skala 5					
Kegiatan 1.4. Penyelenggaraan Keprotokolan, Ketatausahaan, Kearsipan, dan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta					2.482.395	5.963.064	6.215.424	6.489.758	

Sekretariat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 1.4.1. Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kepuasan layanan naskah dinas		3,4 skala 4	3,5 skala 4	3,5 skala 4	3,5 skala 4					
	- Persentase layanan keprotokolan kepada Menteri Sekretaris Negara		100%	100%	100%	100%					

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 181 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan dan pengamanan arsip Kementerian Sekretariat Negara		3,1 skala 4	3,2 skala 4	3,3 skala 4	3,4 skala 4					
	Sasaran Kegiatan 1.4.2. Layanan informasi publik yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara		4,0 skala 6	4.05 skala 6	4.1 skala 6	4.15 skala 6					
	- Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara		100%	100%	100%	100%					

Kegiatan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 1.5. Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara		Jakarta					853.106	2.005.111	2.105.367	2.210.635	
	Sasaran Kegiatan 1.5.1. Pengendalian mutu yang efektif										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- <i>Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara</i>		3,17 (Level 3)	3,22 (Level 3)	3,27 (Level 3)	3,32 (Level 3)					

- Tingkat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara		3	3	3	3					
	- Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%					
	- Persentase satuan kerja yang menyelenggara an fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang		100%	100%	100%	100%					

berlaku . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 185 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>berlaku</i>										
Kegiatan 1.6. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Administrasi Keuangan, dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja		Jakarta					422.418.125	466.880.352	502.955.599	542.538.429	
	Sasaran Kegiatan 1.6.1. Kinerja pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan akuntabel										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- <i>Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian</i>		WTP	WTP	WTP	WTP					

- Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara		92	93	94	95					
	- Persentase tingkat keandalan laporan keuangan sesuai dengan peraturan		100%	100%	100%	100%					
	- Indeks kepuasan manajemen layanan keuangan		3,3 skala 4	3,4 skala 4	3,5 skala 4	3,6 skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 187 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 1.6.2 Kinerja dan penganggaran yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Nilai akuntabilitas kinerja Kemensetneg		76,04 (BB)	76,08 (BB)	76,12 (BB)	76,16 (BB)					
	- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Sekretariat Negara		93,5	94	94,5	95					
	- Persentase dokumen perencanaan kinerja dan anggaran yang		100%	100%	100%	100%					

- Persentase . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>disusun sesuai ketentuan</i>										
	<i>- Persentase dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran yang disusun sesuai ketentuan</i>		100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 1.7. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Presiden		Jakarta					77.283.700	192.509.800	200.818.000	211.191.500	

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 1.7.1 Terwujudnya layanan kepegawaian Sekretariat Presiden yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian Sekretariat Presiden		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 1.7.2 Terwujudnya layanan ketatausahaan, sarana dan prasarana, serta administrasi umum Sekretariat Presiden yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kepuasan pengguna layanan ketatausahaan Sekretariat Presiden		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					

-Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi umum Sekretariat Presiden		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan sarana dan prasarana kantor di lingkungan Sekretariat Presiden		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					
	Sasaran Kegiatan 1.7.3 Terwujudnya layanan										

perencanaan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	perencanaan dan keuangan Sekretariat Presiden yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kepuasan pengguna layanan perencanaan Sekretariat Presiden		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					
	- Indeks kepuasan pengguna layanan keuangan Sekretariat Presiden		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 1.8. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Wakil Presiden		Jakarta					52.469.230	68.150.940	76.074.390	92.672.020	
	Sasaran Kegiatan 1.8.1. Layanan kepegawaian Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi kepegawaian Sekretariat Wakil Presiden		3,07 skala 4	3,13 skala 4	3,13 skala 4	3,2 skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 1.8.2. Layanan tata usaha dan TIK Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kepuasan pengguna layanan ketatausahaan Sekretariat Wakil Presiden		3,07 skala 4	3,13 skala 4	3,13 skala 4	3,2 skala 4					

-Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan pengguna layanan data dan informasi Sekretariat Wakil Presiden		3,07 skala 4	3,13 skala 4	3,13 skala 4	3,2 skala 4					
	Sasaran Kegiatan 1.8.3. Layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										
	- Indeks kepuasan pengguna layanan sarana dan prasarana Sekretariat		3,07 skala 4	3,13 skala 4	3,13 skala 4	3,2 skala 4					

Wakil . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 196 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Wakil Presiden</i>										
	Sasaran Kegiatan 1.8.4. Layanan perencanaan dan keuangan Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kepuasan layanan perencanaan dan penganggaran internal		3,07 skala 4	3,13 skala 4	3,13 skala 4	3,2 skala 4					

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 197 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan layanan pengelolaan keuangan dan kinerja internal		3,07 skala 4	3,13 skala 4	3,13 skala 4	3,2 skala 4					
Kegiatan 1.9. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Militer Presiden		Jakarta					9.843.000	10.828.000	11.910.000	13.101.000	
	Sasaran Kegiatan 1.9.1 Layanan perencanaan dan keuangan Sekretariat Militer Presiden yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan ketentuan		100%	100%	100%	100%					
	- Persentase dokumen evaluasi dan laporan yang disusun sesuai dengan ketentuan		100%	100%	100%	100%					
	- Indeks kepuasan pengguna layanan keuangan Sekretariat Militer Presiden		3,13 skala 4	3,14 skala 4	3,15 skala 4	3,16 skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 1.9.2 Layanan Kepegawaian Sekretariat Militer Presiden yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian Sekretariat Militer Presiden		3,13 skala 4	3,14 skala 4	3,15 skala 4	3,16 skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 200 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 1.9.3 Layanan Ketatausahaan Sekretariat Militer Presiden yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- <i>Indeks kepuasan pengguna layanan ketatausahaan Sekretariat Militer Presiden</i>		3,13 skala 4	3,14 skala 4	3,15 skala 4	3,16 skala 4					
Kegiatan 1.10. Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno		Jakarta					156.012.349	163.812.966	172.003.614	184.043.867	

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 201 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 1.5.1. Terselenggaranya Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno yang Berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- <i>Persentase Target PNB yang terealisasi</i>		100%	100%	100%	100%					
	- <i>Rasio PNB terhadap Biaya Internal (Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional)</i>		50%	50%	50%	50%					



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 202 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan pengguna layanan Gelora Bung Karno (PPKGBK)		3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4					
	- Pertumbuhan Tingkat Occupancy		3%	3%	3%	3%					
	Sasaran Kegiatan 1.5.2. Terselenggaranya Tata Kelola Komplek Gelora Bung Karno yang Berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase tersedianya SPM dan SOP pada BLU yang disusun sesuai ketentuan</i>		100%	100%	100%	100%					
	- <i>Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana</i>		100%	100%	100%	100%					
	- <i>Indeks kepuasan pengguna layanan internal</i>		3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4					
	- <i>Maturitas SPIP</i>		3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4					

- *Persentase . . .*



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan sesuai dengan dokumen analisis pengembangan kompetensi pegawai		100%	100%	100%	100%					
	- Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU		100%	100%	100%	100%					
	- Nilai akuntabilitas kinerja		B	B	B	B					
	- Opini Laporan Keuangan dari Akuntan Publik		WTP	WTP	WTP	WTP					
	- Nilai Evaluasi Kinerja		80%	80%	80%	80%					

-Nilai . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 205 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Anggaran</i>										
Kegiatan 1.11. Pengelolaan Komplek Kemayoran		Jakarta					165.750.505	174.038.030	182.739.932	191.876.929	
	Sasaran Kegiatan 1.11.1. Terselenggarany a Pengelolaan Komplek Kemayoran yang Berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		4,01 Skala 5	4,01 Skala 5	4,01 Skala 5	4,01 Skala 5					
	- <i>Persentase Terget PNB yang Terealisasi</i>		100%	100%	100%	100%					

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 206 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase Kontrak Kerjasama dengan Lembaga atau Badan Usaha		100%	100%	100%	100%					
	-Perbandingan Biaya Operasional dengan PNB		< 50	< 50	< 50	< 50					
	Sasaran Kegiatan 1.11.2. Terselenggaranya Tata Kelola Komplek Kemayoran yang Berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase Tersedianya SPM dan SOP pada BLU yang Disusun Sesuai Ketentuan</i>		100%	100%	100%	100%					
	- <i>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan yang Direncanakan</i>		100%	100%	100%	100%					
	- <i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal</i>		4 skala 4	4 skala 4	4 skala 4	4 skala 4					
	- <i>Maturitas SPIP</i>		3	3	4	4					

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase Pegawai Yang Melaksanakan Pelatihan sesuai Dokumen Analisis Pengembangan Kompetensi Pegawai		50%	60%	70%	80%					
	- Persentase Pengembangan Sistem Informasi BLU		100%	100%	100%	100%					
	- Persentase Laporan Keuangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku		100%	100%	100%	100%					
	- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran		87	88	89	90					

- Nilai . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 209 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 1.12. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Paspampres		Jakarta					4.336.743	4.347.636	4.358.637	4.369.749	
	Sasaran Kegiatan 1.12.1. Dukungan Layanan Perkantoran, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal serta Layanan Pengawasan Internal yang Terpenuhi										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Laporan Evaluasi, Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti dan Jumlah Laporan Audit, Kegiatan Reviu, Persentase Dukungan Perbekalan, Materil, Fasilitas dan Jasa yang Memadahi</i>		100%	100%	100%	100%					

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 1.13. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden		Jakarta					31.477.761	39.850.372	41.842.890	43.935.035	
	Sasaran Kegiatan 1.13.1. Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolanan		100%	100%	100%	100%					
	- Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan		100%	100%	100%	100%					
	- Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan		2 dok	2 dok	2 dok	2 dok					

- Jumlah . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan		10 dok	10 dok	10 dok	10 dok					
	- Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar pelayanan		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok					
	- Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan		9 dok	9 dok	9 dok	9 dok					

- Jumlah . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok					
	- Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan		100%	100%	100%	100%					
	- Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa		100%	100%	100%	100%					

- Jumlah . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 215 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun		2 dok	2 dok	2 dok	2 dok					
Kegiatan 1.14. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Kantor Staf Presiden		Jakarta					82.365.016	119.513.430	125.489.100	131.763.550	
	Sasaran Kegiatan 1.14.1. "Terselenggaranya layanan internal kepada Kantor Staf Presiden sesuai rencana										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase terselenggaranya layanan internal kepada Kantor Staf Presiden sesuai rencana</i>		100%	100%	100%	100%					

Program . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program 2 Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden											- UO: Sekretariat Negara Satker: 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara 2. PPKGBK 3. PPKK 4. Sekretariat Presiden 5. Sekretariat Wakil Presiden 6. Sekretariat Militer Presiden 7. Paspampres 8. Dewan Pertimbangan Presiden 9. Kantor Staf Presiden Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 2.1. Pemberian analisis dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara,										



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 219 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	kewarganegaraan, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- <i>Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden</i>		100%	100%	100%	100%					
	- <i>Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi,</i>		100%	100%	100%	100%					

- *Persentase . . .*



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 2.2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang berkualitas antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks Kualitas Analisis Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakata n Presiden dan/atau Wakil Presiden		2,72 Skala 4	2,84 Skala 4	2,95 Skala 4	3,03 Skala 4					
	- Indeks Kualitas Analisis Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakata n Menteri Sekretaris Negara		2,72 Skala 4	2,84 Skala 4	2,95 Skala 4	3,03 Skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 2.3 Pemberian analisis kebijakan kepada Menteri Sekretaris Negara yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	<i>- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan kepada Menteri Sekretaris Negara yang berkualitas</i>		2.72 Skala 4	2.76 Skala 4	2.91 Skala 4	2.95 Skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 2.4. Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang optimal										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/ atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti</i>		46%	47%	48%	50%					
	- <i>Indeks kualitas analisis pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden</i>		2.92 Skala 4	2.96 Skala 4	3.56 Skala 4	3.76 Skala 4					

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kualitas analisis pengaduan masyarakat kepada Menteri Sekretaris Negara		2.92 Skala 4	2.96 Skala 4	3.56 Skala 4	3.76 Skala 4					
	Sasaran Program 2.5. Pemberian analisis kebijakan kepada Wakil Presiden yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Program										

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kualitas analisis kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing kepada Wakil Presiden		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					
	- Indeks kualitas analisis kebijakan pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kualitas analisis kebijakan pemerintah dan wawasan kebangsaan kepada Wakil Presiden		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					
	Sasaran Program 2.6. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif										

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	<i>- Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri</i>		3,1 skala 5	3,2 skala 5	3,3 skala 5	3,4 skala 5					
	<i>- Indeks efektivitas program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular</i>		3,1 skala 5	3,2 skala 5	3,3 skala 5	3,4 skala 5					
	<i>- Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri</i>		3,58 skala 5	3,60 skala 5	3,62 skala 5	3,64 skala 5					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 2.7. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- <i>Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi pejabat negara</i>		2,48 skala 4	2,56 skala 4	2,64 skala 4	2,72 skala 4					

dan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>dan pejabat lainnya</i>										
	<i>- Persentase rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara, dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%	100%	100%	100%					
	<i>- Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi pejabat pemerintahan dan pejabat</i>		3,10 skala 4	3,20 skala 4	3,35 skala 4	3,5 skala 4					

lainnya . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>lainnya</i>										
	<i>- Persentase Rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya, serta Rancangan Keputusan Presiden mengenai kenaikan pangkat dan pemberhentian PNS yang wewenang penetapannya</i>		100%	100%	100%	100%					

berada . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 233 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>berada atau memerlukan persetujuan Presiden yang disetujui Menteri Sekretaris Negara</i>										
	Sasaran Program 2.8. Layanan pemberian bantuan pemerintah sesuai ketentuan										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	<i>- Persentase penyaluran bantuan pemerintah sesuai</i>		100%	100%	100%	100%					

ketentuan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>ketentuan</i>										
	Sasaran Program 2.9. Terselenggaranya dukungan administrasi personel TNI dan Polri yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- Indeks kepuasan layanan administrasi personel TNI dan Polri		2,92 Skala 4	2,96 Skala 4	3,00 Skala 4	3,04 Skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 2.10. Terselenggaranya dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan		2,92 Skala 4	2,96 Skala 4	3,00 Skala 4	3,04 Skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 2.11. Meningkatnya kelancaraan aktivitas Presiden dan Wakil Presiden melalui dukungan koordinasi pengamanan										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden		4,25 skala 6	4,27 skala 6	4,3 skala 6	4,32 skala 6					

Sasaran . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 237 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 2.12. Terwujudnya dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, serta pers dan media kegiatan Presiden yang lancar										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	<i>-Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden</i>		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>-Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden</i>		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					
	<i>-Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden</i>		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 2.13. Terwujudnya dukungan kerumahtangga an, keprotokolan, serta pers dan media kegiatan Wakil Presiden yang lancar										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- <i>Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga an kepada Wakil Presiden</i>		4,60 skala 6	4,70 skala 6	4,70 skala 6	4,80 skala 6					

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden		4,40 skala 6	4,50 skala 6	4,50 skala 6	4,60 skala 6					
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden		2,8 skala 4	2,87 skala 4	2,87 skala 4	2,93 skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 2.14. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan pengelolaan arsip kepresidenan										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan arsip kepresidenan		3 skala 4	3,1 skala 4	3,2 skala 4	3,3 skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 242 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 2.15. Layanan Fasilitas Pejabat Negara, Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	- Indeks kelancaran layanan sarana dan prasarana Pejabat Negara Tertentu		4 skala 6	4,2 skala 6	4,5 skala 6	5 skala 6					
	- Indeks kelancaran layanan sarana dan prasarana		4 skala 6	4,2 skala 6	4,5 skala 6	5 skala 6					

Mantan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden</i>										
	<i>- Indeks kelancaran layanan pemeliharaan kesehatan bagi Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan Istri/ Suami, mantan Wakil Presiden dan Istri/ Suami, serta Tamu Negara yang setingkat Kepala Negara atau</i>		4 skala 6	4,2 skala 6	4,5 skala 6	5 skala 6					

Kepala . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Kepala Pemerintahan pelayanan pengguna layanan fasilitas Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden</i>										
	<i>- Persentase perawatan dan pemeliharaan pesawat kepresidenan yang dilaksanakan tepat waktu</i>		100%	100%	100%	100%					
	Sasaran Program 2.16. Terwujudnya pelaksanaan tugas khusus pada lembaga lain yang										

anggarannya . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara										
	<i>Indikator Kinerja Program</i>										
	<i>- Persentase terlaksananya pengendalian program-program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, dan strategi komunikasi politik sesuai</i>		100%	100%	100%	100%					

rencana . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>rencana</i>										
	<i>- Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden</i>		86%	88%	91%	95%					

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase layanan pengamanan Presiden, dan Wakil Presiden beserta keluarganya, Mantan Presiden, Mantan Wakil Presiden serta tamu negara setingkat kepala negara/ pemerintah</i>		100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 2.1. Pelaksanaan Analisis dan Administrasi Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan		Jakarta					1.303.459	2.535.391	2.824.249	3.112.456	

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.1.1. Terwujudnya analisis penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang- undangan di bidang perekonomian yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</i>		100%	100%	100%	100%					

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</i>		100%	100%	100%	100%					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.1.2. Terwujudnya analisis penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang- undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</i>		100%	100%	100%	100%					

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</i>		100%	100%	100%	100%					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.1.3. Terwujudnya analisis penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</i>		100%	100%	100%	100%					

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</i>		100%	100%	100%	100%					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.1.4. Terwujudnya analisis penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan</i>		100%	100%	100%	100%					

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan</i>		100%	100%	100%	100%					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 260 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.1.5. Terwujudnya analisis dan penyiapan izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perjanjian internasional, pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara										

seumur . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perjanjian internasional yang berkualitas</i>		100%	100%	100%	100%					

Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 263 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang berkualitas</i>		100%	100%	100%	100%					

Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Persentase penyelesaian administrasi rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden</i>		100%	100%	100%	100%					
	<i>Persentase penyelesaian administrasi Rancangan Keputusan Presiden dan Surat Kuasa Khusus Presiden yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh Presiden</i>		100%	100%	100%	100%					

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 2.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan		Jakarta					2.479.831	4.683.439	5.086.959	5.527.362	
	Sasaran Kegiatan 2.2.1. Terwujudnya penanganan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang berkualitas										

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Kegiatan										
	- Indeks Kualitas Analisis Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah		2,72 Skala 4	2,75 Skala 4	2,80 Skala 4	2,85 Skala 4					

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Indeks Kualitas Analisis Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakata n Menteri Sekretaris Negara dengan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah</i>		2,72 Skala 4	2,75 Skala 4	2,80 Skala 4	2,85 Skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.2.2 Terwujudnya penanganan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan Lembaga Non Pemerintah yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 269 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks Kualitas Analisis Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakata n Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan Lembaga Non Pemerintah yang berkualitas		2,72 Skala 4	2,92 Skala 4	3,1 Skala 4	3,2 Skala 4					
	- Indeks Kualitas Analisis Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakata n Menteri Sekretaris Negara dengan Lembaga Non Pemerintah yang		2,72 Skala 4	2,92 Skala 4	3,1 Skala 4	3,2 Skala 4					

berkualitas . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>berkualitas</i>										
	Sasaran Kegiatan 2.2.3 Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										
	- <i>Persentase</i> pengaduan masyarakat		46%	47%	48%	50%					

kepada . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti										
	- Indeks kualitas analisis pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden		2.92 Skala 4	2.96 Skala 4	3.56 Skala 4	3.76 Skala 4					
	- Indeks kualitas analisis pengaduan masyarakat kepada Menteri Sekretaris Negara		2.92 Skala 4	2.96 Skala 4	3.56 Skala 4	3.76 Skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.2.4 Terwujudnya analisis kebijakan kepada Menteri Sekretaris Negara yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan kepada Menteri Sekretaris Negara		2.72 Skala 4	2.76 Skala 4	2.91 Skala 4	2.95 Skala 4					

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Kegiatan 2.3. Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	Jakarta					4.367.943	4.909.000	5.468.000	6.034.000	
	Sasaran Kegiatan 2.3.1. Terselenggaranya koordinasi kerja sama teknik luar negeri yang efektif berbasis TIK										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										

Tingkat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Tingkat kepuasan mitra koordinasi kerja sama teknik luar negeri</i>		3,02 skala 4	3,04 skala 4	3,06 skala 4	3,08 skala 4					
	<i>Persentase penyelesaian dokumen kerja sama teknik meliputi proyek, tenaga ahli, beasiswa, dan rekomendasi fasilitas kerja sama teknik yang sesuai standar</i>		100%	100%	100%	100%					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 275 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.3.2. Terlaksananya program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular yang efektif										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	<i>Tingkat Kepuasan Peserta Program Kerja teknik Sama Selatan-Selatan dan Triangular</i>		3,02 skala 4	3,04 skala 4	3,06 skala 4	3,08 skala 4					
	<i>Jumlah program kerja sama selatan-selatan yang terlaksana</i>		10	11	12	13					

Jumlah . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>sesuai target</i>										
	Sasaran Kegiatan 2.3.3. Terselenggaranya pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri yang efektif berbasis TIK										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										

Tingkat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 277 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Publik Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri</i>		3,02 skala 4	3,04 skala 4	3,06 skala 4	3,08 skala 4					
	<i>Persentase dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 2.4. Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pejabat Lainnya		Jakarta					607.172	5.283.727	7.893.279	3.010.343	

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 278 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.4.1. Meningkatnya kualitas penanganan administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	<i>- Persentase rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara, dan pejabat lainnya yang</i>		100%	100%	100%	100%					

diselesaikan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>diselesaikan sesuai standar</i>										
	<i>- Persentase rancangan Surat Presiden, Surat Mensesneg dan Surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur terkait pejabat negara, dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%	100%	100%	100%					

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 280 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase salinan dan petikan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara, dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%	100%	100%	100%					
	<i>- Persentase naskah pelantikan pejabat negara dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar</i>		100%	100%	100%	100%					

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 281 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase produk administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya yang ditatausahakan, dikelola datanya serta diarsipkan dan didokumentasikan sesuai standar</i>		100%	100%	100%	100%					
	<i>- Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya</i>		2,48 dalam skala 4	2,56 skala 4	2,64 skala 4	2,72 skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 282 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.4.2. Meningkatnya kualitas administrasi pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks Kepuasan pengguna layanan administrasi pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya		3.1 skala 4	3.2 skala 4	3.35 skala 4	3.5 skala 4					

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase Rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan/ atau pemberhentian Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya, serta Rancangan Keputusan Presiden mengenai kenaikan pangkat dan pemberhentian PNS yang wewenang penetapannya berada atau</i>		100%	100%	100%	100%					

memerlukan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 284 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>memerlukan persetujuan Presiden yang disetujui Deputi Bidang Administrasi Aparatur</i>										

Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase Petikan dan Salinan Keputusan Presiden tentang pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya, kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional</i>		100%	100%	100%	100%					

Jenjang . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Jenjang Utama yang diselesaikan sesuai standar</i>										

Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 287 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase penyiapan bahan analisis dan penyusunan pendapat terkait pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya, kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional</i>		100%	100%	100%	100%					

Jenjang . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Jenjang Utama yang ditindaklanjuti</i>										

- Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase Keputusan Presiden tentang pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya, kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama yang</i>		100%	100%	100%	100%					

pengadministrasiannya . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>pengadministra- siannya diselesaikan sesuai standar</i>										

Kegiatan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 291 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 2.5. Penyelenggaraan Dukungan Fasilitas Pejabat Negara, Mantan Presiden dan /atau Mantan Wakil Presiden serta Tugas Teknis Lainnya		Jakarta					158.273.851	656.224.446	732.877.423	812.487.574	
	Sasaran Kegiatan 2.5.1. Layanan pengelolaan Arsip Kepresidenan yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan arsip kepresidenan		3 skala 4	3,1 skala 4	3,2 skala 4	3,3 skala 4					
	- Persentase Arsip Kepresidenan yang dikelola sesuai standar		100%	100%	100%	100%					
	Sasaran Kegiatan 2.5.2. Layanan Fasilitas Pejabat Negara, Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berkualitas										

Indikator . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 293 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	<i>- Indeks kelancaran layanan sarana dan prasarana Pejabat Negara Tertentu</i>		4 skala 6	4,2 skala 6	4,5 skala 6	5 skala 6					
	<i>- Indeks kelancaran layanan sarana dan prasarana Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden</i>		4 skala 6	4,2 skala 6	4,5 skala 6	5 skala 6					

-Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Indeks kelancaran layanan pemeliharaan kesehatan bagi Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan Istri/Suami, mantan Wakil Presiden dan Istri/Suami, serta Tamu Negara yang setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan</i>		4 skala 6	4,2 skala 6	4,5 skala 6	5 skala 6					

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase perawatan dan pemeliharaan pesawat kepresidenan yang dilaksanakan tepat waktu		100%	100%	100%	100%					
	Sasaran Kegiatan 2.5.3. Layanan Bantuan Pemerintah Sesuai Ketentuan										
	Indikator Kinerja Kegiatan										
	- Persentase Pemberian Layanan Bantuan Pemerintah		100%	100%	100%	100%					

Sesuai . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Sesuai Ketentuan</i>										
Kegiatan 2.6. Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers dan Media kepada Presiden		Jakarta					451.775.600	585.321.700	642.830.000	701.522.700	
	Sasaran Kegiatan 2.6.1 Terwujudnya layanan kerumahtangga an, keprotokolan, serta pers dan media kepada Presiden yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					
	- Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi		4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6	4,95 skala 6					

kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 298 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>kegiatan Presiden</i>										
Kegiatan 2.7. Penyusunan Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan							56.906.850	18.250.880	18.987.590	19.784.250	
	Sasaran Kegiatan 2.7.1. Analisis kebijakan kepada Wakil Presiden bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan bidang penanggulangan kemiskinan		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan bidang pembangunan sumber daya manusia		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					

-Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan terkait Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Strategi Percepatan Pencegahan Stunting		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 2.8. Penyusunan Analisis Kebijakan Kepada Wakil Presiden Bidang Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan		Jakarta					1.246.480	1.495.770	1.794.930	2.153.920	
	Sasaran Kegiatan 2.8.1. Analisis dukungan kebijakan kepada Wakil Presiden pemerintahan dan wawasan kebangsaan yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										

-Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 302 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan bidang Dukungan Hubungan Internasional		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan bidang politik, hukum, dan otonomi daerah		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan bidang wawasan kebangsaan, pertahanan, dan keamanan		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					

- Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 303 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan bidang tata kelola pemerintahan		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					
Kegiatan 2.9. Penyusunan Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden Bidang Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing		Jakarta					939.500	1.127.400	1.352.880	1.623.460	

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.9.1. Analisis dukungan kebijakan kepada Wakil Presiden di bidang pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing yang berkualitas										
	Indikator Kinerja Kegiatan										
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan bidang ekonomi dan keuangan		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					

-Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan kebijakan Bidang industri, perdagangan, Pariwisata, dan ekonomi kreatif		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					
	- Indeks Kualitas Analisis Kebijakan bidang infrastruktur, ketahanan energi, dan sumber daya alam		3,04 skala 4	3,28 skala 4	3,42 skala 4	3,58 skala 4					
Kegiatan 2.10. Penyelenggaraan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan, Pers, Media, dan Informasi kepada Wakil Presiden		Jakarta					71.743.570	141.901.040	145.432.100	134.414.020	

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.10.1 Terwujudnya layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan, pers, media, dan informasi yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kelancaran layanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden		4,60 skala 6	4,70 skala 6	4,70 skala 6	4,80 skala 6					

-Indeks . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 307 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kelancaran layanan keprotokolan, serta pers, media, dan informasi kepada Wakil Presiden		4,40 skala 6	4,50 skala 6	4,50 skala 6	4,60 skala 6					
	- Indeks kepuasan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden		4,20 skala 6	4,30 skala 6	4,30 skala 6	4,40 skala 6					

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 308 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Kegiatan 2.11. Penyelenggaraan Layanan Personel TNI dan Polri, Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dan Pengkoordinasian Pengamanan bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing	Jakarta					32.569.000	36.020.000	37.759.000	39.884.000	

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 309 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.11.1. Penanganan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kepuasan layanan administrasi personel TNI dan Polri		2,92 Skala 4	2,96 Skala 4	3,00 Skala 4	3,04 Skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 310 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.11.2. Penanganan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan		2,92 Skala 4	2,96 Skala 4	3,00 Skala 4	3,04 Skala 4					

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.11.3. Koordinasi Pengamanan Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	- Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden		4,25 skala 6	4,27 skala 6	4,3 skala 6	4,32 skala 6					
	- Indeks kelancaran Koordinasi penyiapan sarana transportasi		4,25 skala 6	4,27 skala 6	4,3 skala 6	4,32 skala 6					

Presiden . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

- 312 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Presiden dan Wakil Presiden</i>										
	<i>Persentase penyelenggaraan koordinasi pengamanan fisik dan non fisik VVIP yang dilaksanakan sesuai standar</i>		100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 2.12. Pengamanan Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarganya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Pemerintah		Jakarta					90.297.447	164.795.643	194.885.029	147.390.058	

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 313 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.12.1. Terselenggaranya operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Pemerintah yang berkualitas										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase Kekuatan Personel, Jumlah Kegiatan dan Dukungan dalam Pelaksanaan Pengamanan terhadap Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/ Pemerintah</i>		100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 2.13. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden		Jakarta					2.454.420	12.308.290	12.923.710	13.569.900	

Sasaran . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2.13.1. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden dalam perumusan nasihat dan pertimbangan										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										
	<i>- Persentase data dan penyajian informasi yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden</i>		100%	100%	100%	100%					

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 316 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase layanan perumusan nasihat dan pertimbangan yang dilaksanakan tepat waktu		100%	100%	100%	100%					
	- Persentase rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disusun tepat waktu		100%	100%	100%	100%					

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 317 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase dokumen rencana kerja dan laporan Biro Data dan Informasi yang disusun tepat waktu</i>		100%	100%	100%	100%					

Kegiatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 318 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 2.14. Pengendalian Program- Program Prioritas Nasional, Pengelolaan Isu Strategis, dan Komunikasi Politik		Jakarta					4.395.217	24.746.490	25.983.820	27.283.010	
	Sasaran Kegiatan 2.14.1. Terselenggarany a pengendalian program- program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, dan komunikasi politik										
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>										

-Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 319 -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (*dalam ribuan)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>- Persentase terselenggaranya pengendalian program-program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, dan komunikasi politik sesuai rencana</i>		100%	100%	100%	100%					



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB V **PENUTUP**

Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan bagi semua Satuan Kerja di Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah diamanatkan oleh RPJMN 2020-2024.

Dokumen Renstra Kementerian Sekretariat Negara, yang memuat kajian lingkungan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan, selanjutnya akan dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga-lembaga yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Renstra Kementerian Sekretariat Negara perlu dipahami seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi dapat tercapai secara optimal. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya Renstra jangan sampai membatasi ruang gerak dan menghambat, namun sebaliknya justru mendorong inovasi dan terobosan-terobosan baru. Oleh karenanya, kerangka operasionalisasi Renstra dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan dinamika internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara dan akan dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Plt. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
Hukum dan Reformasi Birokrasi,



Agussalim